



Media Mahasiswa

WASHILAH

Untuk Peningkatan Perilaku Islami Penggalakan Kualitas Ilmiah, dan Pembobotan Idealisme

Tabloid Edisi 125

Sarjana Parsel

**[SPECIAL
MAGANG]**

Hal. 5 | SK Ugal-Ugalan, LK Tumbang Perlahan

Hal. 6 | Dosen Jual Buku, Mahasiswa Beli Nilai



Washilah_Uinam



www.washilah.com

Tetap Ada

- Tajuk -

Terborgol Rasa Segan

Seolah belum cukup merepotkan dengan tumpukan syarat administratif untuk mengikuti ujian dan ketegangan menghadapi pertanyaan tajam dari para dosen penguji, mahasiswa masih harus disibukkan dengan urusan yang tak kalah menguras energi—parsel.

Kebiasaan ini, yang dianggap sebagai bentuk penghormatan, justru sering menjadi beban tambahan, baik secara mental maupun finansial. Bukannya fokus pada persiapan akademik, mahasiswa terjebak dalam tekanan sosial berlabelkan “rasa terima kasih.”

Karena dinormalisasi dan terus dilakukan berulang, hal tersebut seolah bukan lagi suatu kesalahan. Menjadi sebuah kebudayaan yang diternak terus-menerus. Inilah yang disebut Hannah Arendt, seorang pemikir Jerman, sebagai banalitas kejahatan (*Banalität des Bösen*).

Orang Indonesia dikenal memiliki budaya penuh hormat. Namun, sifat “tidak enakan” yang berlebihan sering kali membuat masyarakat menoleransi pelanggaran dengan bersembunyi di balik topeng sopan santun. Kebiasaan ini perlahan mengakar menjelma membentuk konstruksi sosial.

Setiap anggota kelompok seolah dituntut untuk bersikap seragam dengan yang lain. Ada rasa tidak enak jika tampil berbeda, takut menjadi bahan pembicaraan mayoritas, atau khawatir kehilangan tempat dalam pergaulan.

Rasa takut dan khawatir yang membelenggu, membuat mahasiswa mau tak mau harus mengikuti apa yang telah dilakukan mahasiswa lain di hari-hari sebelumnya. Hingga tak memikirkan dirinya sendiri.

Istilah seperti *people pleaser* dan *ewuh pakewuh* dalam budaya—kecenderungan untuk menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dalam konteks pemberian parsel, rasa “tidak enak” memaksa mahasiswa untuk mengikuti kebiasaan yang sebenarnya tidak relevan dengan profesionalitas akademik.

Normalisasi kebiasaan buruk ini mengakar karena tekanan sosial dan lemahnya penegakan aturan. Hal ini hanya akan terus berlangsung jika tidak ada kebijakan tegas yang melarang tradisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi resmi dari birokrasi untuk menghapus budaya parsel agar fokus akademik mahasiswa tidak terganggu oleh beban yang tidak perlu—alih-alih hanya menolak lewat pernyataan lisan.



Foto Bersama Peserta In House Training Journalistic (IHTJ) XXIII. | Foto: Washilah - Arsip.

Tak ada yang tau kalau ternyata kita bisa sampai ke titik ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Tak lupa pula, sholawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Usai melewati beberapa rangkaian hingga menjadi bagian dari keluarga kecil Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Informasi Mahasiswa Alauddin (LIMA) Washilah, dan melewati tujuh bulan proses pemagangan yang sangat padat, akhirnya Tabloid Edisi 125 Spesial Magang ini terbit.

Jalan menuju terbitnya tabloid cukup berat, banyak cobaan yang datang silih berganti. Mulai dari narasumber yang tak ingin diwawancarai, hasil wawancara yang tak memuaskan, isu yang diganti, reporter yang sering tak memberi kabar, foto dan ilustrasi yang progresnya lamban, dan yang terberat adalah rasa malas. Tak usai dengan itu, kerjaan lain juga harus ikut dijalankan secara

bersamaan, yakni hutang-hutang kekaryaan yang tak kunjung lunas dan kepanitiaan Musyawarah Anggota (Musa) yang harus kejar-kejaran dengan tabloid.

Katanya, semua pekerjaan akan terasa mudah dan ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Namun, dari 24 anggota magang yang bertahan hingga saat ini, terlalu banyak bualan-bualan janji yang terdengar di telinga. Puluhan lebih orang tersebut baranya seringkali padam—tandas bak ditelan bumi pada masa-masa krusial dan datang bagai badai tanpa aba-aba ketika pekerjaan hampir tuntas.

Namun, alhamdulillah tabloid ini masih bisa terbit di antara hal ihwal yang tak kunjung reda dengan sedikit kesadaran kawan, juga sokongan dari Dewan Senior, Dewan Pakar, Pengurus dan Anggota Biasa.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga kecil Washilah yang telah kebersamai kami. Mulai dari In House Training Journalistik (IHTJ), proses pemagangan, hingga penggarapan tabloid ini. Tabloid merupakan karya

untuk menapaki jalan kami, jalan untuk melangkah lebih jauh, jalan dari anggota muda menuju anggota biasa. Perjalanan ini masih panjang, semoga semuanya kuat menghadapi tantangan dan rintangan yang akan dihadapi ke depannya.

Pada tabloid edisi kali ini, kami hadir untuk menyajikan gambaran tentang keadaan kampus kita tercinta—UIN Alauddin Makassar. Pada beberapa bagian dalam tabloid ini, kami menyoroti normalisasi budaya parsel, kampus abai kualitas dosen, intervensi ugul-ugalan, hingga persoalan Pungli buku yang juga menggerogoti kampus.

Selain itu, kami juga menyajikan kehidupan mahasiswa yang mendiami asrama kampus, termasuk masalah pencurian. Tentunya, kami juga tak lupa berbagi kesan dan pesan kami selama menjadi bagian dari keluarga kecil Washilah.

Kami sadar tabloid ini pasti jauh dari kata sempurna. Tapi kami bangga dapat berkarya dan terus belajar di sini.

Akhir kata, selamat membaca, peluk semangat dari kami!!!



Diterbitkan sesuai SK Rektor UIN Alauddin Makassar No. 158 tahun 2024 | **Pelindung dan Penasehat:** Rektor UIN Alauddin Makassar | **Penanggung Jawab:** Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar | **Dewan Pembina:** Faisal Mustafa, Muhammad Fahrul Irsas, Muhammad Aswan Syahr, Arya Nur Prianugraha, M. Shodlihin, **Dewan Pakar:** Jushuatul Amriadi, Irham Sari, Astiti Nuryanti, Kardiman Aksah, Ismail HM, | **Pimpinan Umum:** Rahmat Rizki | **Sekretaris Umum:** Hilda Nurfaidah | **Bendahara Umum:** Malebbi Salsabila | **Direktur Pemberitaan:** Saldi Adrian | **Direktur Penelitian dan Pengembangan Organisasi:** Arya Asb | **Direktur Artistik:** A Muh Saleh | **Direktur Operasional:** Muhammad Iskar | **Direktur Media Sosial:** Ahmad Bilal | **Direktur Usaha:** Nur Fitri | **Redaktur Daring:** Sriwahyuni | **Redaktur Tabloid:** Nadhilla Putri Hasir | **Redaktur Foto:** Mahfud Al-Qadri | **Redaktur Penyiaran:** Rusmianti | **Redaktur Audio Visual:** Desviana | **Bidang Kaderisasi dan Pengembangan SDM:** Muh Azhar S Putra | **Bidang Desain dan Layout:** Rahmat Hidayat | **Bidang Periklanan:** Dinda Lestari | **Reporter:** Hardiyanti, M Nur Fathun Na'im Syaiful, Amalia Waliffah, A Soesilo Ridwan, Nur Hastina, Fitria Alfaningsih, Siti Ulwiyah, Risnawati Suardi, Iqbal Mufid, Monica Ayu Lestari, Muhammad Yusrifar, Nur Rahma Hidayah, Aa Min Abduh, Ashabul Maimanah, Yuyun Wahyuni, Hulwana Ahsyani.

Maccarita!



Untuk produk jurnalistik yang lebih baik lagi, kami menyediakan ruang untuk suara pembaca. Kirim kritik dan saranmu dengan *scan barcode* ini.



Ilustrasi dan Layout: NurKadri, Nurfadia (Magang)

Sarjana Parsel



Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, menyerahkan Parcel senilai Rp 96.000 kepada dosen pembimbing dan penguji sebelum melakukan Sempro, Selasa (31/12/2024). | Foto: Washilah - Mochtar Luthfi Alansari (Magang).

Washilah - Anti pusing tujuh keliling, setelah dinyatakan berhak maju sidang Seminar Proposal (Sempro) oleh pihak Program Studi (Prodi)-nya. Bukan karena presentasinya, tapi karena kelimpungan akan membawa parcel apa untuk menyenangkan hati dosen penguji maupun pembimbingnya.

Anti bukan nama sebenarnya. Ia merupakan seorang mahasiswi Prodi Biologi angkatan 2021. Sebagaimana mahasiswa semester tujuh, Anti belakangan disibukkan oleh aktivitas mahasiswa akhir.

Ia baru saja balik dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) setelah empat puluh lima hari mengabdikan. Anti yang mengaku keuangannya sedang menipis sehabis pulang dari KKN, dibuat tambah "kering" karena harus merogoh kocek lagi demi parcel—demikian sebutan bagi bingkisan berisi makanan, minuman atau apapun itu.

Sebetulnya tidak ada aturan tertulis terkait apa saja makanan yang perlu dibawa, hanya saja Anti merasa malu jika membawa makanan yang biasa saja. Karena pemberitahuan dari prodi menyatakan sempronya hanya seorang diri, ia berencana mengeluarkan dana sebesar Rp 500.000 untuk membeli makanan ringan, buah, air mineral, hingga makanan berat.

Nominal itu cukup besar bagi keluarga Anti. Ia bahkan bingung mendapatkan uang dari mana, sebab dirinya baru saja membayar UKT dan indeks secara bersamaan. Anti juga merasa malu untuk minta ke orang tuanya.

"Orang tuaku itu cuman biasa bilang, irit-irit ki nak, jangan ki terlalu boros," ucap Anti saat ditemui di taman Fakultas Sains dan Teknologi (29/11/2024).

Kabar baik berhembus, mendekati hari sempronya, tiba-tiba saja pihak Prodi Biologi memberitahu ada salah seorang mahasiswa lainnya yang akan sempro di hari yang sama dengannya. Sehingga, Anti dan mahasiswa itu membagi dua dana parcel tersebut dari Rp 500.000 menjadi Rp 250.000. Walau masih terbilang mahal, ia sedikit lega, setidaknya dana yang dikeluarkan dapat diminimalisir.

Sekretaris Prodi Biologi, Zulkarnain menegaskan pihaknya tidak mewajibkan mahasiswa membawa parcel saat ujian.

"Tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang bersikap apatis. Meskipun tidak membawa parcel mereka tetap lulus," ucapnya saat ditemui di Ruang Prodi Biologi (21/11/2024).

Zulkarnain beranggapan, seharusnya para dosen yang diberi tunjangan dan gaji, tidak perlu lagi dibawakan makanan hanya karena membimbing ataupun menguji saat ujian. Baik itu sempro, Seminar Hasil (Semhas), ataupun munaqasyah (tutup).

Apalagi, tiap dosen yang di SK-kan sebagai penguji dan pembimbing mendapat honor, Rp 750.000 per mahasiswa bagi pembimbing, dan Rp 50.000 per mahasiswa bagi penguji sempro. Sedangkan bagi penguji semhas dan komprehensif Rp 100.000 per mahasiswa. Itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023.

Zulkarnain juga menyayangkan mahasiswa yang membawa parcel dengan alasan sebagai tanda terima kasih, ataupun dengan alasan "tidak enak." Hanya karena teman atau seniorinya yang sudah-sudah juga turut membawa parcel.

"Akhirnya berdampak pada jurusan, makanya kita itu dari pihak pimpinan prodi sudah menegaskan, agar mahasiswa tidak membawa parcel saat ujian. Meskipun sebagai bentuk ucapan terima kasih," tegas Zulkarnain.

Namun, di hari yang sama saat Washilah menemuinya, Zulkarnain tampak menyantap makanan ringan di ruang sidang sempro bersama beberapa dosen lainnya. Ia bahkan meminta waktu sejenak untuk menikmati nasi kotak berisi ayam dan lauk pauknya sebelum diwawancara.

Salah satu mahasiswa yang berada di ruangan tersebut membenarkan, jika kue maupun makanan berat yang Zulkarnain konsumsi adalah parcel dari mahasiswa yang menjalani sempro di hari itu.

Cerita Anti yang merasa keberatan dengan keberadaan parcel, juga dirasakan oleh Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, sebut saja Mira. Berbeda dengan Anti yang dibebaskan memilih

menu parcel, pihak prodi Mira justru menentukan menu apa yang harus ia bawa.

"Orang tuaku bilang kenapa harus ada biaya konsumsi untuk dosen, apakah tidak ada memang dari prodi?" ucapnya, di taman Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (18/11/2024).

Ia juga mempersoalkan SK Dekan, terkait panitia ujian sempro skripsi yang umumnya dikeluarkan bersamaan dengan keputusan sempro mahasiswa yang terkait. Pada poin ketiga berbunyi "Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar."

Ia meraba makna SK tersebut, menurutnya sudah terpampang jelas bahwa pihak kampus yang harus bertanggung jawab untuk segala konsumsi saat ujian.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Prodi Sosiologi Agama, Ratnah Rahman mengelak. Ia mengatakan bahwa dari pihak prodi tidak pernah merekomendasikan mahasiswa untuk membawa parcel. Keputusan terkait konsumsi sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa "Kami tidak pernah memaksa mahasiswa membawa parcel saat ujian. Jika mereka mampu dan sepakat, silakan. Namun jika tidak, itu tidak menjadi masalah," ujarnya saat ditemui di ruangan Prodi Sosiologi Agama (20/11/2024).

Ia menambahkan, bahwa pihak prodi hanya memberikan saran dan tidak pernah memberatkan mahasiswa saat mahasiswa bertanya tentang konsumsi. Karena parcel atau konsumsi sepenuhnya adalah opsional dan tidak memengaruhi ujian.

Pun begitu, saat mengkonfirmasi pada Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama lainnya yang tidak ingin disebutkan namanya itu membenarkan jika pihak prodi menentukan menu yang akan dibeli. Dan untuk pemenuhan parcel tersebut, mahasiswa yang melakukan ujian di hari yang sama membagi rata uang yang akan dikeluarkan.

Perihal SK Dekan terkait panitia ujian seminar proposal skripsi, Ratnah menegaskan konsumsi saat ujian tidak ditanggung oleh prodi.

Menurutnya, semua fakultas yang ada di UIN Alauddin Makassar tidak ada yang menanggung konsumsi saat

ujian baik sempro, semhas, maupun munaqasyah.

Tak Perlu Bawa Parcel Saat Ujian

Pernyataan menolak parcel sebetulnya sudah gencar diutarakan sejak beberapa tahun silam. Pada tahun 2015 contohnya. Prodi Akuntansi dalam berita berjudul "Mahasiswa Dilarang Bawah Parcel Pra Ujian Meja" yang diterbitkan Washilah pada 26 April mengklaim tidak menerima bingkisan dalam bentuk apa pun. Dalam berita tersebut, salah satu Dosen Akuntansi, Wahyuddin Abdullah mengatakan, kebiasaan membawa parcel pada saat ujian meja—penamaan untuk ujian sempro di masa itu—bertentangan dengan konsep akuntansi yang dipelajari di bangku perkuliahan.

"Dalam konsep akuntansi, apapun yang diberikan sebelum dan sesudah bekerja dianggap sebagai sogokan. Dan hanya akan merusak independensi pekerjaan," kata dia (26/4/2015).

Walaupun demikian, pada Senin, 25 November 2024, salah satu dosen Prodi Akuntansi yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan pihak Prodi Akuntansi kini tidak lagi melarang keras parcel.

Selain Prodi Akuntansi, pada tahun 2016 Jurusan Ilmu Politik juga melarang mahasiswa membawa parcel dalam ujian apapun sebagaimana yang diberitakan Washilah pada 26 Maret dalam tulisan berjudul "Jurusan Ilmu Politik Larang Mahasiswa Bawa Parcel".

Washilah mengonfirmasi apakah larangan itu masih berlaku atau tidak kepada mahasiswa semester akhir Prodi Ilmu Politik. Mahasiswa bersangkutan mengatakan hal tersebut sudah tidak berlaku. Sebab, beberapa kenalannya justru diberikan opsi untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 150.000 atau membeli sendiri makanan dari luar.

"Misalnya tidak mau ribet, mahasiswa diberikan opsi kumpul saja dana, jurusan yang urus. Tapi jika tidak mau yah mahasiswa sendiri yang beli parcelnya di luar," ucapnya, (20/11/2024).

Pada Senin, 25 November 2024, Washilah mewawancarai Kepala Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK), Kaswad Sartono. Terkait budaya membawa parcel saat seminar.

Kaswad berpendapat bahwa ada atau tidaknya parcel tidak akan mempengaruhi nilai mahasiswa yang akan melakukan seminar. Ia beranggapan parcel hanya sebagai bentuk kebahagiaan jika bisa memberikan sesuatu kepada orang yang dihormati.

"Misalnya seorang santri ke ruang kyai membawa gula pasir, membawa teh, itu sebagai seseorang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang yang sangat dihormati. Itu kebahagiaan batin tersendiri," ucap Kaswad.

Saat ditanyakan terkait regulasi membawa parcel saat ujian, Kaswad menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan pelarangan parcel di internal pimpinan,

Padahal, pada Tabloid Edisi 94 Washilah, dalam salah satu tulisan berjudul "Tolak Parcel" menyebutkan, di tahun 2015 sempat berhembus wacana penolakan parcel. Hal tersebut

disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan kala itu, Prof Mardan.

Prof Mardan saat itu menegaskan akan mengumpulkan sejumlah unsur pimpinan kampus untuk membahas penghapusan parcel.

"Kalaupun mau mengucapkan terima kasih, tidak di ruang lingkup kampus. Karena jangan sampai ada indikasi bahwa lembaga melegalkan," tutur dia dalam tulisan tersebut.

Sejumlah pihak dari tingkatan jurusan, fakultas maupun universitas getol menyatakan tidak membiarkan bahkan melarang parcel. Hanya saja, belum ada langkah nyata yang ditempuh. Bahkan, sejak wacana pelarangan berhembus di tahun 2015, hingga tahun ini, SK pelarangan parcel tak kunjung menunjukkan rupanya.

Apakah Parcel Dapat Disebut Gratifikasi?

Saat ditanyakan tentang parcel yang berpotensi gratifikasi, Kaswad berpendapat yang disebut gratifikasi ialah pemberian seseorang kepada pejabat negara yang bisa mengubah kebijakan. Ia menyimpulkan bahwa pengertian itu tidak sesuai dengan budaya membawa parcel.

"Kesimpulannya parcel itu pemberian seorang mahasiswa kepada dosen setelah ujian maka itu bagian dari hadiah," kata Kaswad.

Berbanding terbalik dengan pernyataan Kaswad tentang parcel sebagai bagian dari hadiah, Wakil Ketua Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan, Anggareksa mengatakan, parcel secara tidak langsung sudah mengarah pada tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, menurutnya pemberian yang dilakukan oleh pihak jurusan, fakultas, hingga universitas sama saja menormalisasi praktek gratifikasi yang terjadi di kampus tersebut.

"Bahkan sudah masuk dalam tindakan pemerasan atau penyalahgunaan wewenang karena ada unsur paksaan (memberatkan mahasiswa) dalam proses itu," ucap Angga (29/12/2024).

Ia menambahkan, masalah parcel harus menjadi perhatian serius bagi pihak kampus khususnya rektor, Angga menyayangkan bahwa praktik membawa parcel ini selain memberatkan mahasiswa juga penerimaan parcel, bisa saja mempengaruhi penilaian dosen dalam ujian mahasiswa tersebut.

"Sehingga praktik tersebut jika dilakukan dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas lulusan mahasiswa UIN," kata Angga.

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi didefinisikan sebagai "Pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diberikan."

Dalam UU No. 31/1999 Juncto UU No. 20/2001 sendiri menyebutkan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

**Penulis: Wahyu Arabbi/Ummu Kalsum (Magang)
Editor: Saldi Adrian

Evaluasi Dosen Hanya Formalitas?

Washilah - UIN Alauddin Makassar memiliki sistem Course Evaluation Survey (CES) pada portal akademik yang diisi mahasiswa setiap enam bulan. Di sini, kinerja setiap dosen pada tiap semester dinilai. Namun, sistem penilaian ini tidak berjalan baik. Penilaian mahasiswa kepada dosen dinilai hanya formalitas belaka.

Apa sejumlah poin penilaian kinerja dosen yang akan diisi mahasiswa. Mulai dari metode pembelajaran hingga kejelasan dosen memberikan nilai. Mahasiswa juga dapat menu-liskan saran dan testimoniya kepada dosen terkait.

Aldi, salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) selalu mengisi penilaian tersebut tiap semester. Namun, ia tidak melihat ada yang berubah. Kinerja dosen tetap sama. Padahal, mulanya Aldi merasa sistem CES menarik karena mahasiswa bisa memberikan penilaian secara langsung kepada dosen.

"Begitu awalnya, tapi sampai di semester 7, saran dan kritik yang disampaikan, kayak tidak diperhatikan. Begitu-begitu *ji*," keluhnya saat ditemui Washilah, Sabtu, (23/11/2024).

Satu waktu, Aldi pernah mendapati dosen yang jarang sekali memberikan kuliah tatap muka. Selama satu semester, Aldi mengaku hanya bertemu dua kali. Pertama, saat kontrak kuliah, dan kedua saat akhir semester.

"Paling sering online, atau disuruh kerja tugas. Tatap muka cuman dua kali, kontrak kuliah, lalu tiba-tiba

final," ujarnya.

Saat pengisian CES tiba, Aldi kemudian memberikan penilaian kepada dosennya sesuai dengan yang ia rasakan selama satu semester. Dari sejumlah penilaian, ia memberikan masing-masing nilai rendah kepada dosennya. Tak lupa, ia juga sertakan saran dan tanggapannya kepada dosen itu.

"Saran yang kutulis waktu itu, kalau bisa diganti saja dosennya. Sayang mahasiswa, sudah bayar UKT mahal-mahal, tapi tidak diajar dengan baik," keluhnya sekali lagi.

Bagai menulis di atas air. Pada semester berikutnya, Aldi kembali diajarkan oleh dosen itu. Metode pembelajaran, jadwal perkuliahan dan lainnya dianggapnya sama dengan sebelumnya. Sudah 6 kali Aldi mengisi kuesioner CES pada portal akademik. Enam kali pula dirinya memberikan saran dan kritik kepada beberapa dosen yang ia anggap kurang profesional. Namun tetap saja sama.

Hal serupa juga disadari Satria. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) itu juga menganggap sistem CES hanya sebagai pemenuhan administrasi belaka.

"Formalitas dosen *ji* yang begituan kurasa. Tidak ada eksistensinya untuk saya juga," keluhnya pada Washilah, Rabu (13/11/2024).

Sebenarnya, dosen juga akan dievaluasi melalui penilaian lain. Mereka punya Beban Kerja Dosen (BKD) yang wajib dilaporkan setiap semester.

Kepala Biro Administrasi, Akademik, dan Kemahasiswaan (AAKK), Kaswad Sartono menyebut, BKD digunakan untuk mengevaluasi kinerja dosen di tiap semesternya. "Kinerja

dosen itu dievaluasi sedemikian rupa. Ada pedomannya di BKD."

Berdasarkan Pedoman Evaluasi BKD, ada sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Semuanya sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

Pedoman BKD mengharuskan dosen untuk mengisi laporan beban kerja dosen, baik dosen yang sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi.

Laporan tersebut memuat semua aktivitas dosen dalam format laporan melalui laman web yang telah disediakan. Tentunya, dilengkapi dengan semua bukti pendukung yang harus diupload.

Jika dosen tidak melaporkan BKD-nya, maka akan diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis. Sedangkan yang tidak mencukupi syarat minimal, yakni 12 sks akan diberikan sanksi berupa penundaan tunjangan hingga penundaan sertifikasi.

Setiap kinerja menurut Kaswad bakal diperhitungkan. Jika tidak memenuhi standar, tentu upah yang diterima juga akan berkurang.

"Jadi sanksi juga langsung kena ke situ (pengurangan upah)," sambung-nya.

Salah satu kinerja dosen yang paling sering disoroti adalah soal jadwal mengajar yang serampangan. Terkadang jadwal yang sudah ditetapkan tiba-tiba berubah karena kesibukan dosen.

Dosen FDK, Nur Hastina, mengaku sering melakukan penyesuaian jadwal perkuliahan. Bahkan, beberapa kali

proses belajar mengajar dilakukan pada malam hari secara daring. Namun, menurutnya hal tersebut tidak jadi masalah selama ada kesepakatan.

"Kalau kuliah malam, saya juga kasih kuliah malam. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan sama mahasiswa," ujarnya kepada Washilah, Senin, (25/11/2024).

Dosen Program Studi Jurnalistik itu mengatakan, seringkali dosen melakukan perkuliahan secara daring karena punya kesibukan lain. Bahkan, ada yang tidak menginformasikan kesibukan di luar tugasnya sebagai tenaga pengajar. Misalnya dosen yang melakukan studi lanjut tanpa diketahui pihak jurusan.

"Perlu disampaikan ke pihak jurusan. Sehingga ada keringanan yang diberikan," jelasnya.

Soal perkuliahan daring, Kaswad Sartono menilai hal itu sah-sah saja. Dengan catatan, harus ada kesepakatan antara mahasiswa dan dosen yang bersangkutan.

"Kuliah daring pun biasanya terselenggara apabila betul-betul ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh dosen tersebut. Yang tidak boleh itu kalau 14 kali pertemuan, 14 kali online. Itu menyalahi pedoman," ucapnya.

Kaswad juga menyebutkan bahwa dosen yang mempunyai beban kerja mengajar di luar kota akan dikenakan regulasi berbeda. Dosen tersebut dapat mengajar secara daring dengan syarat atau aturan yang jelas. Tetapi, aturan seperti itu hanya diberikan kepada dosen luar biasa, bukan dosen tetap.

"Ada surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi dosen yang tugas belajar,"

turnya.

Jika terdapat dosen yang bermasalah, maka secara teknis, kata dia perlu diselesaikan terlebih dahulu pada tingkatan prodi.

"Kalau ada dosen yang tidak masuk tanpa ada alasan, saya kira bisa disampaikan ke ketua Prodi," ujarnya.

Hal ini disebut Kaswad sudah dilakukan beberapa kali. Namun, laporan yang masuk bukan hasil dari sistem CES, melainkan pelaporan langsung pada rapat edukasi atau pemanggilan secara *face to face*.

"Rapat edukasi kan tingkat fakultas, jadi untuk seluruh dosen itu tidak."

Butuh Sistem Evaluasi yang Jelas

Selain tugas mengajar, beban kerja tambahan bagi dosen dinilai Serikat Pekerja Kampus (SPK), Luthfi Kalbu Adi turut menambah persoalan.

Ia mengatakan, kelalaian dosen biasanya diakibatkan karena beban kerja tambahan di luar tridharma perguruan tinggi yang diberikan oleh pimpinan kampus tanpa memberikan balasan atau insentif.

"Misalnya Dekan atau Rektor yang nyuruh-nyuruh saja. Tidak memberikan *money* prestasi. Sehingga itu membuat banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dosen. Misalnya nyari tambahan tapi dengan cara-cara tidak elok," ungkapnya.

Kendati begitu, Luthfi menganggapnya sebagai permasalahan serius yang tidak boleh disepelekan, sehingga jika hal tersebut dilakukan oleh dosen, maka perlu untuk berkomunikasi dan menjelaskan kondisinya kepada mahasiswa.

"Saya kira penting untuk menjalin komunikasi sama mahasiswa," ucapnya kepada Washilah saat dihubungi melalui daring akhir 2024 lalu.

Oleh karena itu, sistem evaluasi dosen, kata Luthfi perlu dilandaskan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menjaga kualitas tenaga pengajar bagi mahasiswa.

"SOP itu sangat-sangat penting. Ya gimana kita mau melakukan satu evaluasi gitu ya. Kalau SOP-nya, instrument-nya itu kita nggak punya," ungkapnya.

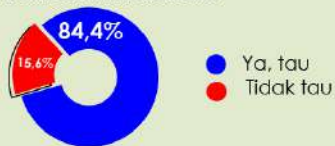
Menurut Luthfi, undang-undang menegaskan dosen harus siap dikritik dan dievaluasi untuk perbaikan kinerja. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Kata dia, kampus harus membuat mekanisme pengawasan yang jelas. Sehingga SOP untuk pengevaluasian kinerja dosen juga jelas.

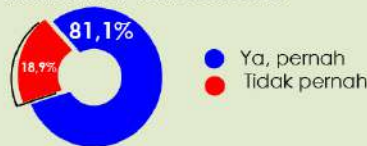
"Dia (kampus) nggak sampai sana. Sehingga pengawasan dilakukan secara sporadik dan nggak terukur," tutupnya.

Akhirnya, sistem CES yang diberlakukan di UIN Alauddin Makassar pun tidak efektif. Saran dan masukan yang diberikan mahasiswa di tiap semester hanya jadi omong kosong. Tidak jadi bahan evaluasi.

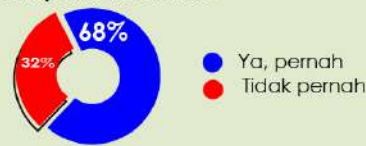
Apakah kamu tahu pada akhir semester ada evaluasi kinerja Dosen di Portal Akademik UIN Alauddin Makassar?



Apakah kamu pernah mengisi kuesioner evaluasi kinerja dosen pada portal akademik di akhir semester?



Apakah kamu pernah mengkritik dosen melalui kuesioner evaluasi kinerja dosen pada portal akademik?



Menurutmu, apakah evaluasi kinerja Dosen pada portal akademik itu berjalan sebagaimana mestinya?



Apakah ada perubahan pada dosen yang kamu berikan kritik di portal akademik?



Infografis: Washilah - Nurul Emil Dayani (Magang)

Riset ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terkait Sistem Evaluasi Kinerja Dosen pada Portal Akademik di UIN Alauddin Makassar. Pengumpulan pendapat dilakukan melalui metode pembagian kuesioner oleh Koordinator Litbang (magang) Washilah pada 13 Desember hingga 23 Desember 2024. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak untuk menentukan responden yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kami memilih 337 responden yang tersebar di delapan fakultas dengan margin of error 5%. Hasil kuesioner ini dianggap penting oleh Litbang Washilah agar dapat diketahui oleh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar.

*Penulis: Faiz Dito Setiawan/
Nurul Muhammadiyah/Sappe (Ma-
gang)

*Editor: Rahmat Rizki

SK Ugal-Ugalan, LK Tumbang Perlahan

Washilah - *Belum usai mahasiswa menyoal Surat Edaran (SE) 3652, kini Lembaga Kemahasiswaan (LK) diujungi beragum Surat Keputusan (SK) yang diduga keluar secara ugal-ugalan.*

Tujuh orang pengurus LK FEBI, sebelumnya, diskorsing akibat melanggar SE 2591 (sekarang menjadi SE 3652) tak hanya itu, kini LK FEBI juga mendapatkan intervensi dari pimpinan fakultas.

Semua bermula dari sederet aksi yang dilakukan LK FEBI untuk menolak SK Skorsing terhadap para pengurus LK FEBI yang menentang keberadaan SE 2591. Namun, Dekan FEBI, Amiruddin, abai menemui masa aksi yang berdemostrasi. Kerap kali ia hanya diwakili Wakil Dekan (WD) III FEBI, Hasbiullah.

Geram terhadap sikap tak acuh dekan, LK FEBI kembali melakukan aksi pada tanggal 19 Agustus 2024 lalu di *lobby* FEBI dengan membawa tuntutan baru, salah duanya adalah SK kepanitiaan dan transparansi anggaran kepanitiaan Pengenalan Budaya, Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Namun, Amiruddin lagi-lagi tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Yang nampak hanyalah Hasbiullah.

Mengenai alokasi anggaran PBAK, Hasbiullah berdalih jika alasan transparansi anggaran belum disampaikan lantaran saat itu SK kepanitiaan PBAK fakultas belum dikeluarkan. Menurutnya, SK kepanitiaan harus lebih dulu diterbitkan disusul persoalan anggaran. "Anggaran dibicarakan jika ada kepanitiaan," jelasnya saat diwawancara di ruangan WD FEBI (15/11/2024).

Ketidakhadiran Dekan FEBI tidak dapat ditolerir pihak LK FEBI. Pada akhirnya, LK FEBI dalam aksinya memutuskan menarik diri dari kepanitiaan PBAK sebagai bentuk pengekaman kepada para pimpinan. Keputusan tersebut langsung mendapatkan respon dari pimpinan fakultas.

"Penarikan diri saudara, kami terima," ucap Hasbiullah melalui pengeras suara merespon keputusan LK FEBI.

Karena penarikan diri LK FEBI dari PBAK, Amiruddin mengambil tindakan. Pada pokoknya menetapkan kepanitiaan PBAK, yang diisi oleh dosen-dosen, staf, serta *security*.

Somasoi Dibalas Sanksi

Lelah terhadap sikap pimpinan fakultas yang tak memberikan respon yang bagus, LK FEBI memasukkan surat somasi kepada pimpinan pada 20 September 2024 lalu.

Ketua Senat Mahasiswa (Sema) FEBI, Andi Dani menjelaskan bahwa dalam surat somasi tersebut berisi satu tuntutan dan dua ancaman.

Tuntutannya adalah pencabutan SK Skorsing, sedangkan ancamannya apabila tuntutan tidak direspon dalam 2x24 jam maka LK-FEBI tidak akan menjalankan roda organisasi, lalu ancaman kedua adalah sodoran nama pengurus LK FEBI sekitar 120 orang yang siap bersama-sama di skorsing.

"Karena yang diskorsing adalah orang-orang yang terlibat dalam aksi," jelasnya.

Respon terhadap surat somasi

tersebut baru muncul pada tanggal 4 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan keluarnya SK pembekuan pengurus LK FEBI yang dimuat dalam SK nomor 3150 Tahun 2024 tentang pembekuan lembaga FEBI oleh pimpinan FEBI.

Terkait lamanya jeda antara masuknya surat somasi dan keluarnya SK pembekuan pengurus, Hasbiullah mengatakan bahwa saat itu pimpinan telah berpikir bahwa LK FEBI telah beku dengan sendirinya, setelah LK FEBI memasukkan surat somasi.

"Kami berpikir mereka sudah beku sebenarnya," katanya.

Namun bagi Dani ada beberapa hal menjangkal, seperti yang direspon pimpinan FEBI, bukan tuntutan melainkan ancaman.

"Ancaman tidak menjalankan roda organisasi jika dalam 2x24 jam tuntutan tidak direspon," ungkap Dani.

Hal janggal lainnya yaitu adanya cacat administrasi dalam SK pembekuan tersebut. Dani mengatakan poin tersebut adalah poin 4 dan 5 yang terdapat dalam bagian mengingat.

Poin tersebut adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.

Dirinya mengatakan telah mencari poin tersebut, namun tidak ditemukan.

"Berdasarkan pengkajian data ada cacat administrasi," ucapnya.

Menyoal pembekuan para pengurus LK FEBI Hasbiullah mengatakan pembekuan tersebut didasari dua hal. Yaitu atas permintaan LK FEBI sendiri yang dibuktikan dengan surat masuk, dan ketidakaktifan LK FEBI dalam partisipasi acara PBAK.

"Mereka (LK FEBI) tidak ingin lagi bersinergi dengan Fakultas," ujarnya.

Mengenai audiensi yang tak pernah digubris, Hasbiullah menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan bahwa hampir setiap hari ketua lembaga masuk ke ruangannya untuk melakukan audiensi secara personal.

"Kalau audiensi secara resmi mungkin tidak, tapi audiensi secara personal itu sering," ungkapnya.

Terkait SK pembekuan LK FEBI, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FEBI, Yahya Nur menyayangkan karena SK pembekuan tersebut malah ia peroleh dari salah satu Ketua Jurusan di FEBI dan bukan melalui WD III.

"Secara prosedur harusnya WD III yang komunikasi ke LK," jelasnya.

Pernyataan Yahya tersebut sejalan dengan salah satu ketentuan dalam Buku Pedoman Mahasiswa pada bagian Struktur Organisasi Mahasiswa UIN Alauddin serta Keputusan Dirjen

Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Terlihat pada struktur tersebut organisasi yang terdapat di Fakultas seperti Sema-F, Dema-F, dan HMJ/HMPS langsung bergaris instruktif dengan Dekan atau WD.

Menanggapi hal tersebut, Hasbiullah mengatakan bahwa pada intinya LK FEBI sudah mendapatkan suratnya, walaupun melalui WhatsApp. Ia menambahkan kalau SK tersebut sudah berkali-kali disebar sampai ke grup pimpinan.

"Pokoknya dapat dari mana saja yang jelas diberikan. Sekarang kan tidak kayak dulu harus didatangi, WhatsApp sudah ada," elaknya.

Terkait peristiwa yang menimpa LK FEBI, Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana dalam wawancara daring mengecam pimpinan FEBI.

"Tentu ini tidak benar, penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan komunikatif," tegasnya.

Satria mengatakan pembekuan ini adalah bentuk pendisiplinan dan pembongkaran gerakan atau aspirasi mahasiswa dalam aktivitas akademik.

Seharusnya lembaga kemahasiswaan berhak melakukan aktivitas dengan nyaman dan tanpa khawatir atas pendisiplinan yang terjadi hari ini.

"Pimpinan dalam hal ini rektorat yang ada di UIN Alauddin Makassar tentu bermasalah," tambahnya.

Dirinya sekali lagi mengancam upaya demokrasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi agar kegiatan serupa tak berulang lagi.

Terakhir, Satria juga mengatakan bahwa mahasiswa harus memastikan langkah-langkah yang memadai untuk mengembalikan situasi kebebasan akademik yang terjadi agar berjalan kembali dengan baik.

Berawal dari SE Hingga Terbitlah Juknis Pemilihan

Mahasiswa

Intervensi tak hanya dirasakan oleh LK-FEBI. Jika di FEBI intervensi dirasakan oleh lembaga, berbeda dengan yang terjadi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), di mana intervensi dirasakan oleh salah satu mahasiswa.

Samuel (bukan nama sebenarnya) mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusannya (HMJ), namun dirinya mendapat intervensi dari Ketua Jurusannya (Kajur).

Ia tak diberikan surat rekomendasi sebab dianggap telah mencoreng nama jurusan.

Namun jika dilihat pada Petunjuk Teknis (Juknis) Pemilihan Pengurus LPP-F, SEMA-F, DEMA-F, dan HMJ/HMPS/HMD dibuat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3614 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Muh Khalifa Mustami.

Pada BAB II membahas mengenai Persyaratan Umum Pasal 3, ditulis bahwa "Calon Ketua DEMA-F dan HMJ/HMPS/HMD diwajibkan memiliki IPK minimal 3,25, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, nilai TOEFL minimal 400, serta melampirkan sertifikat prestasi di tingkat nasional atau internasional."

Dalam wawancara yang dilakukan (30/12/2024), Samuel mengatakan ia mencalonkan dirinya karena berdasarkan dari hasil rapat angkatannya, yang dimana ia diusung oleh para temannya. Namun saat meminta surat rekomendasi untuk melengkapi berkasnya, ia malah tidak diberikan oleh pihak jurusan.

Saat kembali menghadap ke ruang jurusan untuk mempertanyakan terkait tak diber-

ikannya surat rekomendasi, ia malah mendapat kritikan dari kajurnya. Kritikan tersebut mengenai video kritikan fasilitas kampus yang telah diupload di media sosial, yang menurut kajur telah mencoreng nama baik jurusan.

"Katanya tidak dikasih surat rekomendasi karena video ku pernah viral, padahal kan video itu kayak cuma general ji, bukan cuma menyudutkan satu jurusan," jelasnya.

Samuel mengatakan selama masih terdaftar mahasiswa aktif maka tak ada batasan untuk menjadi calon Ketua di HMJ.

Hal Tersebut sejalan dengan syarat calon ketua yang tertera pada Buku Pedoman Mahasiswa Nomor 4961 yang berbunyi, "Berstatus sebagai mahasiswa aktif."

Samuel merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh kajur, karena telah menunjukkan sikap intervensi. Semestinya Kajur harus netral, tidak memandang dari latar belakang mana dirinya berproses.

Menurutnya kajur harus memberikan surat rekomendasi. Dirinya berpendapat, yang menjalankan kepanitiaan Mahasiswa dan juga ia telah melengkapi persyaratan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan.

"Seharusnya kayak dikasih surat saja, karena yang tau lembaga dan dinamika LK itu yang menjalankan, bukan pimpinan yang di atas, seharusnya tidak ada pembatasan kayak begitu," ungkapnya dengan nada kecewa.

Mengonfirmasi mengenai persyaratan menjadi ketua lembaga yang telah dikeluarkan oleh UIN Alauddin, namun tak tertulis dalam Buku Pedoman Mahasiswa. Kabag Kemahasiswaan, Baharuddin menjelaskan bahwa peraturan yang belum terdapat dalam SK Dirjen dapat ditambah oleh perguruan tinggi masing-masing.

"Apa yang belum kita kasi masuk itu, bisa dipersilahkan perguruan tinggi untuk yang kasi masuk," terangnya.

**Penulis: Rhizka Amelia K/Mujahid (Magang)
Editor: Arya Ash



Ilustrasi: Washilah - Nurul Emil Dayani (Magang)

Dosen Jual Buku, Mahasiswa Beli Nilai

Washilah - Sore itu, di sudut kelas, Chandra (bukan nama sebenarnya) duduk tenang, menyimak materi yang diberikan sang dosen. Namun, ketika sang dosen mulai membahas sebuah buku yang menurutnya wajib dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), suasana di kelas seketika berubah.

"Kalian ini Mahasiswa FSH, bagaimana bisa jadi Mahasiswa FSH kalau kalian tidak punya buku? paling sedikit tiga. Intinya mahasiswa yang saya ajar wajib punya buku ini, ya!" ucap Chandra, menirukan sang dosen.

Seisi kelas hanya merespon dengan kalimat "Iye, Bu" yang disuarakan dengan lemah oleh mahasiswa. Tidak ada satupun yang mengeluarkan interupsi lain, seakan mereka setuju dengan kewajiban yang diberikan sang dosen barusan.

Sebelum kelas berakhir, sang dosen kembali bersuara. "Ingat, saya tidak memaksa. Tapi kalau kalian tidak beli, ya begitulah," Chandra tahu betul apa maksud itu.

Tepat ketika sang dosen keluar dari kelas, suara protes dari mahasiswa mulai bersahutan, memaki sejadinya karena diwajibkan membeli buku. Pasalnya permintaan sang dosen tidak main-main, tiga buku harus mereka beli dengan harga 348 ribu. Bagi sebagian mahasiswa, harga itu bukanlah angka yang kecil. Namun, tidak ada satupun yang berani melakukan protes. Sebab mereka tahu, tidak membeli buku sama halnya dengan membiarkan nilai "jelek" terpampang di Kartu Hasil Studi (KHS) nantinya.

Di tengah keributan yang dilakukan oleh para temannya, Chandra memilih diam di posisinya. Ia tidak ikut larut dalam perdebatan, pikirannya jauh melayang memikirkan uang yang akan digunakan nanti untuk membeli buku.

Kehidupannya di perantauan sangat terbatas. Sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah, uang yang ia terima sebesar 6,6 juta setiap semester, lalu dipotong untuk membayar UKT sebesar 2,4 juta. Sisanya, harus ia kelola dengan cermat untuk memenuhi kebutuhannya selama satu semester penuh.

"Kalau kiriman dari orang tua paling banyak dua ratus ribu per bulan, itu pun tidak setiap bulan," keluhnya.

Untuk mengatasi itu, Chandra bekerja serabutan di sebuah pondok tahfidz, tempat ia tinggal di yayasan. Di sana, ia membantu berbagai kegiatan untuk mendapatkan upah kecil. Namun, pekerjaan itu tidak datang setiap hari.

"Biasanya sebulan paling dapat pekerjaan 3-4 kali. Upahnya kecil, habis untuk bensin dan kebutuhan sehari-hari. Jadi, untuk beli buku yang

mahal itu, uang saya ndak cukup," jelasnya.

Tak mau nilainya menjadi taruhan, Chandra terpaksa putar otak. Solusi yang ia dapat saat itu hanya satu, meminjam uang pada teman-temannya. Dengan harga buku hampir mencapai angka empat ratus ribu itu, ia akhirnya meminjam uang dari dua teman dekatnya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah menerima beasiswa semester depan.

Pembayaran buku pun ia lakukan dengan cara dicicil, sebab sang dosen membiarkan hal demikian agar mahasiswa tidak merasa "keberatan." Tiga puluh ribu akhirnya Chandra bayar setiap minggunya hingga buku itu lunas.

Naasnya, begitu buku-buku itu tiba di tangannya, Chandra hanya membacanya sekali dua kali saja, itupun karena ia tidak ingin merasa rugi setelah mengeluarkan uang untuk membeli buku tersebut. Bahkan, satu dari tiga buku yang ia beli masih tersegel plastik dengan sempurna. Bukunya pun jarang digunakan dalam perkuliahan, sebab sang dosen yang mewajibkan membeli buku jarang hadir dalam perkuliahan.

Sebenarnya, sang dosen sudah sempat dilaporkan oleh mahasiswa dari jurusan lain terkait praktik serupa. Sejak saat itu, sang dosen lebih berhati-hati dalam memilih kalimat ketika ingin memberitahu mahasiswa. Namun, esensi dari kewajiban membeli buku tidak hilang.

"Sekarang caranya lebih halus, lebih berkala. Tapi tetap saja kesannya seperti paksaan," ungkapnya.

Chandra bukan satu-satunya mahasiswa yang men-

alami kejadian tersebut. Mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), sebut saja Lina, juga menyampaikan pengalaman yang serupa. Ia merasa bahwa situasi ini menempatkan mahasiswa pada posisi yang serba salah sebab buku yang ditawarkan oleh dosen berkisar harga 150 ribu. Namun setelah dicek di toko oren, harganya jauh lebih murah. Uang sebesar 60 ribu cukup Lina keluarkan untuk membeli buku tersebut.

Sayangnya, setelah buku itu ia miliki, sang dosen tetap mencatat nama Lina sebagai orang yang akan membeli buku di dosen tersebut. Lina tidak punya pilihan lain walaupun sudah sempat protes. "Mau ndak mau haruska beli lagi," keluhnya.

Etika Akademis dan Regulasi yang Belum Tepat Sasaran

Kejadian ini bukan hal baru dan telah menjadi praktik umum. Mata kuliah dosen yang mewajibkan mahasiswa membeli buku, terutama karya tulis yang mereka terbitkan sendiri, sudah berlangsung cukup lama di berbagai kampus, termasuk di UIN Alauddin Makassar. Buku-buku ini sering kali dijadikan "bahan wajib" untuk lulus dalam mata kuliah tertentu.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11, pendidik dilarang menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam dis-

tribusi buku—baik pendidik maupun tenaga kependidikan—tidak boleh memaksakan penjualan buku kepada mahasiswa. Bahkan, jika aturan ini dilanggar, maka dosen yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 374 KUHP, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Namun, meskipun aturan ini sudah ada, praktik ini tetap saja terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan III FEBI, Amiruddin, mengatakan laporan terkait praktik penjualan buku secara paksa selalu terbuka untuk ditindaklanjuti.

"Kami terbuka menerima laporan terkait dosen yang memaksa mahasiswa membeli buku. Ini bukan hanya soal kewajiban membeli buku, tetapi juga tentang etika dan keadilan dalam pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, di Fakultas Sains dan Teknologi (FST), kebijakan yang tegas telah dikeluarkan untuk mencegah praktik tersebut. Surat dengan nomor 2993 mengenai Larangan Pemaksaan Pembelian Buku Ajar, yang ditandatangani langsung oleh Dekan FST, Fahmyddin A'raaf Tauhid pada tanggal 29 Oktober 2024.

Namun, masalah ini seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif individual dosen atau mahasiswa, tetapi juga sebagai refleksi dari sistem pendidikan yang lebih besar.

Serikat Pekerja Kampus (SPK), Luthfi Kalbu Adi, menjelaskan bahwa tugas pengelolaan kampus, seperti mengelola jurnal atau kegiatan institusi, sering kali tidak diimbangi dengan

insentif finansial yang layak.

Hal ini mendorong sebagian dosen mencari kompensasi dengan cara lain, termasuk dengan cara yang tidak etis. "Ketika kampus memberi tugas tambahan seperti mengelola jurnal atau kegiatan administratif, seharusnya ada kompensasi yang jelas. Tapi kenyataannya, banyak dosen yang tidak mendapatkan apresiasi finansial," ungkapnya.

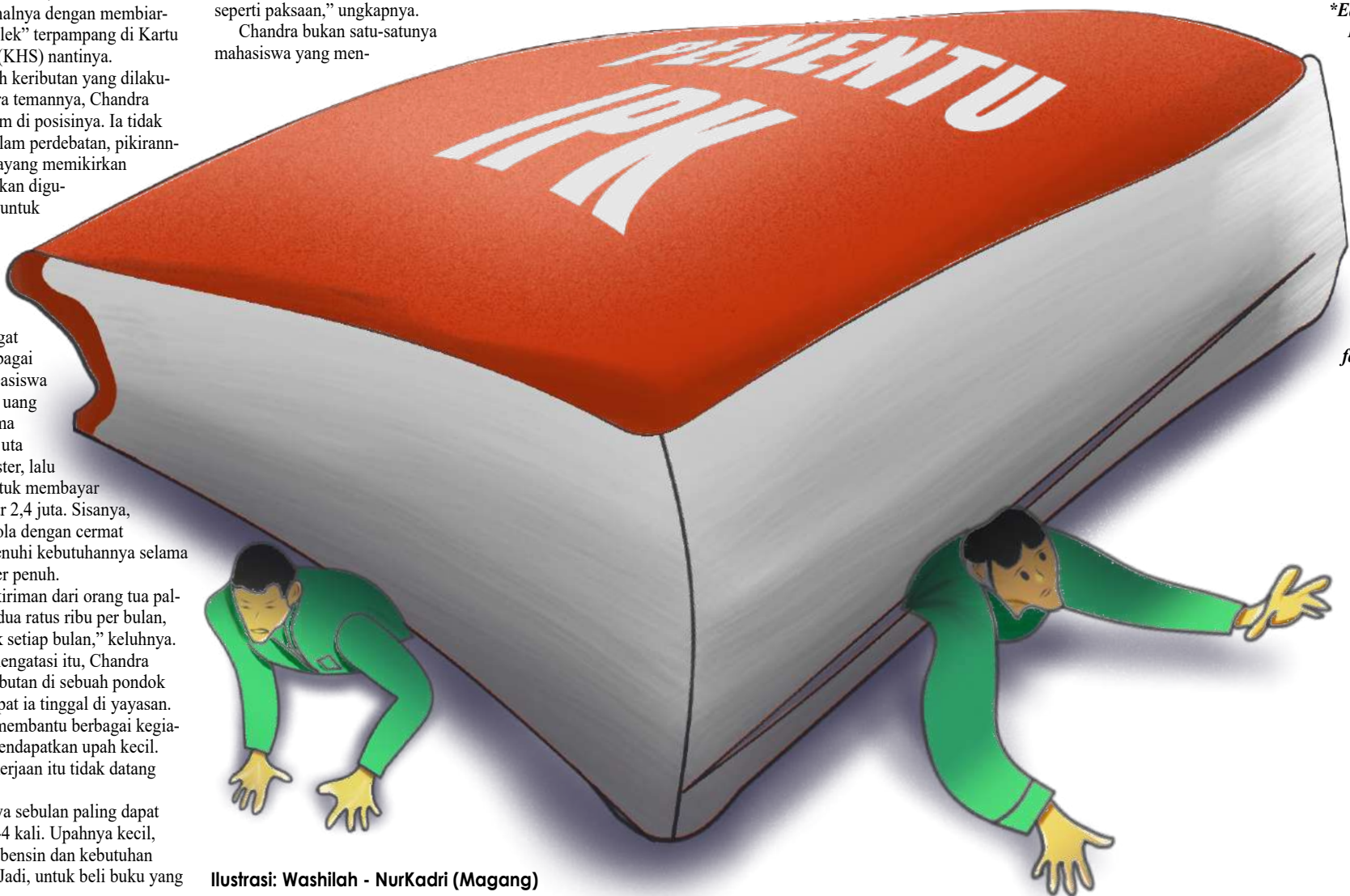
Luthfi juga menyoroti bahwa fleksibilitas profesi dosen justru sering menimbulkan benturan kepentingan antara tugas mengajar, pengelolaan kampus, dan instruksi dari atasan. Dalam praktiknya, hal ini bisa menciptakan dilema. Misalnya, ketika dosen dipanggil oleh pimpinan kampus di tengah jadwal mengajar, seringkali prioritas diberikan kepada atasan.

Situasi semacam ini, menurut Luthfi, membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak ideal, seperti mewajibkan mahasiswa membeli buku yang ditulis dosen tersebut.

"Ketika pengelolaan kampus tidak diimbangi dengan penghargaan yang layak, wajar jika ada dosen yang mencari tambahan pendapatan dari sumber lain, meskipun caranya tidak sepenuhnya benar," jelasnya.

Dengan demikian, persoalan ini bukan hanya tentang integritas individu dosen, tetapi juga tentang sistem yang belum sepenuhnya mendukung keseimbangan peran dan insentif yang adil bagi para pendidik.

***Penulis: Nur Rahmadhani Lira (Magang)
*Editor: Hilda Nur-**



faidah

Ilustrasi: Washilah - NurKadri (Magang)

Mencari Aksesibilitas di Kampus Peradaban

Washilah - UIN Alauddin Makassar belakangan menerima beberapa mahasiswa disabilitas. Namun, apakah aksesibilitas di kampus peradaban telah terpenuhi?

Salah satu mahasiswa disabilitas dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Nur Alif Rizki menganggap aksesibilitas yang terdapat di UIN Alauddin masih jauh dari kata layak.

Fasilitas penunjang bagi mahasiswa difabel belum tersedia sama sekali. Misalnya Guiding Block—marka khusus yang berbentuk ubin-ubin dengan pola bertekstur yang digunakan untuk membantu penyandang disabilitas, terutama disabilitas netra.

Alif merasa cukup kesulitan. “Bisa itu tunggu ka orang menyeberang baru ikut menyeberang juga,” ujarnya.

Minimnya fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas juga dikeluhkan Hendra Alfaysa. Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama (SAA) ini mengeluhkan ketersediaan fasilitas penunjang bagi disabilitas fisik seperti.

Kewajiban Kampus Inklusif

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, ditegaskan bahwa setiap institusi pendidikan wajib memberikan akomodasi yang layak dan mendukung perkembangan mahasiswa difabel.

Salah satu kampus yang mulai memperhatikan aksesibilitas difabel adalah universitas Hasanuddin (Unhas). Kampus merah ini bahkan sudah memiliki Pusat Disabilitas (Pusdis) yang menjalankan fungsi penelitian, advokasi dan layanan inklusi disabilitas.

Pada usia yang terbilang dini—kurang lebih satu tahun berdiri, pusat disabilitas Unhas berhasil menjangkau sebanyak kurang lebih 25 mahasiswa disabilitas dari berbagai angkatan.

Kepala Pusdis Unhas, Ishak Salim, mengatakan bahwa kampus wajib

menyediakan layanan aksesibilitas. Di antaranya akomodasi layak, punya tim relawan, layanan mobilitas, layanan belajar, hingga layanan komunikasi.

Dengan menerima mahasiswa difabel, kampus kata dia juga sudah harus mempersiapkan fasilitas penunjang bagi mereka.

“Menerima difabel itu satu kemajuan. Tapi itu masih perlu ditindak lanjuti dengan perubahan-perubahan atau renovasi di ruang-ruang tertentu, khususnya ruang mobilitas. Misalnya jalur dari fakultas ke fakultas, di mana kursi roda mudah lewat,” ucapnya.

Akomodasi layak kata Ishak bukan hanya berkaitan dengan aksesibilitas, namun bagaimana kampus atau universitas menyediakan kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa difabel. Seperti penyediaan juru bahasa isyarat dan lainnya.

“Teman difabel (relawan) yang banyak membantu dalam proses memberikan layanan mobilitas. Antar jemput untuk difabel fisik, yang berkursi roda,” jelasnya.

Sedangkan untuk layanan belajar dan komunikasi, Ishak sebut kampus mesti memperhatikan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa difabel.

“Kalau kerja tugas, menemani atau mengumpulkan tugasnya. Juga memberikan kemudahan akses saat mahasiswa ingin bertemu dosen, pembimbing akademik dan seterusnya,” sambungnya.

Namun, bagi Ishak, inklusivitas bukanlah hal instan. Berbagai upaya diusung, mencakup sosialisasi melalui berbagai kegiatan, seperti talkshow, diskusi publik, hingga pemberitaan di media kampus. Semua ini bertujuan meningkatkan kesadaran civitas akademik tentang pentingnya inklusi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Inklusif disabilitas adalah proses, bukan tujuan.”

Ishak mengungkapkan bahwa penerimaan terhadap isu disabilitas di perguruan tinggi, termasuk di Sulawesi Selatan, masih rendah.

“Banyak yang tahu bahwa difabel



Hendra Alfaysa, salah seorang mahasiswa penyandang disabilitas Cerebral Palsy (CP) dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Rabu (8/1/2025). | Foto: Washilah - Nurfadillah (Magang).

memiliki hak atas pendidikan, tetapi tidak semua paham bagaimana kampus harus menyiapkan diri untuk mendukung mereka,” ujarnya.

Kurangnya pengetahuan dan pengalaman membuat banyak pihak di kampus merasa ragu-ragu dalam menangani mahasiswa difabel.

Oleh karena itu kata Ishak, sosialisasi dan pelatihan menjadi langkah penting untuk memastikan semua pihak di kampus memahami dan mendukung inklusi.

“Mahasiswa difabel kuliah dengan kondisi yang tidak akses. Mungkin masih ada stigma. Itu berat. Mereka butuh ruang nyaman,” tutupnya.

Komitmen penerimaan mahasiswa difabel bukan hanya jalur afirmasi juga ikut digaungkan. Ishak bilang diskriminatif terhadap ragam disabilitas masih perlu diatasi dengan cara yang semestinya.

Akomodasi kampus layak difabel dinilai baik ketika seluruh elemen kampus ikut berperan aktif, berpartisipasi, dan berkolaborasi dengan organisasi disabilitas.

Aksesibilitas Bukan Prioritas

UIN Alauddin memang sudah menerima mahasiswa difabel sejak beberapa tahun lalu. Namun kampus yang dinahkodai Hamdan Juhannis ini terkesan belum siap. Fasilitas penunjang bagi mahasiswa difabel belum terlihat bakal terealisasi.

Keluhan mahasiswa difabel soal aksesibilitas bahkan disebut Kepala Bagian Umum, Salman belum bisa dipenuhi. Menurutnya, pengadaan layanan disabilitas baru bisa diusahakan jika sudah banyak mahasiswa difabel di UIN Alauddin.

“Kalau satu dua orang bisa ditangani oleh prodi atau teman-temannya. Tapi kalau banyak, harus ada kebijakan khusus dari kampus,” tegasnya.

Menurutnya, membangun fasilitas untuk mahasiswa disabilitas adalah hal yang penting. Namun, kampus belum mampu untuk memenuhi kebutuhan karena terkendala anggaran.

“Kalau mau adakan fasilitas untuk disabilitas, ya mau. Tapi tidak ada uangnya,” tuturnya.

Dengan dana yang terbatas, kebutuhan mendesak seperti perbaikan atap bocor, pemasangan Air Conditioner (AC), dan memastikan lampu di ruangan berfungsi dengan baik justru

menjadi skala prioritas.

Salman menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas adalah kunci dalam pembangunan fasilitas. Dirinya sebut setiap dana yang dikucurkan harus digunakan secara optimal.

Meskipun begitu, Salman tidak menafikan bahwa mahasiswa disabilitas tetap membutuhkan perhatian khusus sebab jumlah mereka juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Untuk sekarang, penyiapan fasilitas yang aksesibel bagi difabel, kata Salman belum menjadi prioritas. Pasalnya, alokasi anggaran kampus harus didasarkan pada skala prioritas.

“Mana yang paling mendesak? Itu yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai sudah dibuatkan untuk mereka dengan biaya yang mahal lalu tidak digunakan,” tandasnya.

**Penulis: Nurul Emil Dayani/
Mochtar Luthfi Alanshah/Bahria
(Magang)*

**Editor: Nadhilla Putri Hasir*





**Civitas Akademika
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar**

Mengucapkan

**Selamat Hari Amal Bakti Ke-79
Kementerian Agama RI**

Prof. Dr. H. Barsihannor, M.Ag

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

BERGANDENGAN TANGAN

Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, atau di hari-hari setelahnya, pun tak ada yang mengira dalam perjalanan ini ada saja satu-dua orang yang memilih untuk melepaskan tangan dan keluar dari dekapan. Katanya, perjalanan ini terlalu berat dan melelahkan. Perjalanan yang dimulai dengan ratusan kawanan pun kini tersisa beberapa, beberapa yang kini saling menghangatkan sembari menguatkan dan berbagi tawa dalam rumah kecil bernama Rumah Jabatan (Rujab) Washilah. Berjalan dan berlari bersama-sama dengan bergandengan tangan hingga mencapai garis *finish* pemagangan dan setelahnya.

Perjalanan ini bisa dibilang cukup panjang, tujuh bulan bukanlah waktu yang sebentar. Semoga yang melepaskan gandingan tersebut tak menyesal, dan semoga yang masih memegang gandingan tangan ini walau tak seerat dahulu masih berpikir untuk terus bertahan. Perjalanan kami kedepannya masih panjang, kami tak bisa meramal hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, yang perlu kita lakukan sekarang dan kedepannya adalah terus bergandengan tangan, memegang dengan sekuat mungkin, dan berdoa agar benih pikiran untuk melepaskan tangan tak kian muncul dalam kepala satu diantara kami yang sedang bergandengan tangan.

Rhizka Amelia K

"Kau sudah sejauh ini dan berfikir untuk berhenti?" Kalimat yang sering kali muncul di kepala kala rasa lelah datang. Ya, 7 bulan bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak hal baru yang ku dapatkan selama ber-Washilah. Memilih bergabung untuk mengisi waktu luang, tapi ternyata kita yang harus meluangkan waktu untuk ber-Washilah.

Sappe

Rugi! Menggambarkan buat mereka yang memilih meninggalkan Washilah. Terima kasih untuk mereka yang memilih untuk bertahan! Badai akan berlalu.

Nurfadia

Berproses di Washilah berarti siap mengorbankan waktu dan tenaga demi kepentingan organisasi. Akan tetapi, prosesnya terasa ringan karena dibalut kehangatan orang-orang di dalamnya.

Sarliana

Jujurly setelah masuk di Washilah itu kurasa berat sekali jalani, bahkan kadang berpikirla untuk mengundurkan diri. *But*, di sini mi diajar ka banyak hal baru, salah satunya itu berlatih ka untuk percaya diri. Banggaka juga sama orang-orang yang ada dalam lingkup Washilah karena selalu saling *support*.

Fitra Nur Suci

Washilah tak pernah ada dalam *life-list planning* ku, namun sekarang aktivitasnya menjadi hal yang ku tekuni seperti menulis berita dan membuat Washilah News yang kadang menjengkelkan jika tidak terbit, hingga utang feature dengan serba-serbi bualan janji untuk melunasinya. Di balik semua itu, untungnya ada lbe penghuni kekal Rujab yang membuat betah dan saksi beragamnya karakteristik manusia di dalamnya.

Ummu Kalsum

Washilah adalah organisasi yang jadwalnya sangat padat, tidak bisa diganggu hingga rasa untuk berhenti itu ada. Namun, kesempatan, materi, ruang dan hal positif lainnya membuat saya berpikir untuk apa saya berhenti hanya karena jadwal yang padat?

Wahyu Arabbi

Karena merupakan organisasi pertama ku, jadi baru ka rasakan ternyata organisasi dan senioritas tidak menyenamkan itu, dan pesan ku semoga Washilah bisa terus menjadi penyambung lidah rakyat UIN Alauddin Makassar *lop u*.

Nur Kadri

"Ripuh" adalah kata yang tepat untuk menggambarkan aktivitas saya selama ber-Washilah. Namun, dibalik semua itu banyak pengalaman-pengalaman baru, teman serta senior yang menyenangkan. Mungkin itulah yang membuat saya bertahan di balik aktivitas yang amat sangat padat.

Sahril

Washilah memberikan saya banyak hal baru di antaranya sikap antara senior-junior dan pengembangan kader yang sangat menarik dengan adanya teori dan praktik penugasan. Untuk saran saya, sebaiknya waktu pemagangan ditambah agar penggarapan ilmu bagi anak magang tidak terdesak sehingga dapat memahami apa yang didapat lebih banyak.

Ulya Muthmainnah Ammar

Selama di Washilah saya banyak belajar, saya terus akan belajar dan belajar.

Bahria

Terima kasih atas segala prosesnya dan banyak-banyak sayang untuk Washilah.



St Mardiah Rezky Andini

Washilah adalah tempat pertamaku berorganisasi di kampus, ku kira segampang itu untuk bertahan di sini, ternyata ngos-ngosan. Sempat tidak direstui orang rumah, tapi kuyakinkan mereka bahwa Washilah akan mengantarku ke jalan yang benar, tidak seperti organisasi lain. Tetapi rasa ingin keluar itu pasti ada tapi mengingat lagi apa alasanku bergabung. Saya banyak belajar hal baru di sini yang pastinya bermanfaat sekali di hidupku.



Nurul Muhammadiyah

Pengalaman luar biasa yang didapatkan. Apalagi ketika karyanya kita dipublish di media, itu merupakan kebahagiaan tak ternilai, tetap *gacor* Washilah.



Achmad Fadhil

Di Rumah Jabatan (Rujab) Washilah salah satu tempat untuk yang ingin belajar, hingga berproses di dunia jurnalistik dan memiliki kekeluargaan yang begitu erat, semoga media informasi Washilah tetap berada di poros kebenaran dan melawan penindasan.



Nurfadillah

Berawal dari ketidaktahuan mengenai lembaga ini, namun seiring waktu, lembaga ini menjadi bagian yang sulit untuk ditinggalkan. Walaupun terkadang rasa tidak percaya diri muncul, merasa tidak pantas berada di sini. Washilah terima kasih untuk semua pelajaran dan pengalaman berharga yang telah diberikan.



Nur Fathanah

Kadang kala kita dihadapkan oleh pilihan dan tidak memilih, tapi itu juga merupakan suatu pilihan. Memikirkan konsekuensi itu penting tapi jika tidak memilih kapan kita akan mencoba? *So*, seperti kata Haechean "*Don't be afraid to fail but be afraid not to try*," kalau nggak sekarang kapan lagi? Dan mengenai pilihanku, aku melangkah pada Washilah, semoga rumah ini tetap menjadi tempat pulang bagiku.



Ida Yani

Bergabung di Washilah adalah keputusan terbaik bagi saya, Washilah dipenuhi dengan suka dan duka serta memberikan banyak pengalaman baru yang berharga bagi saya. Meskipun terkadang saya merasa capek dengan tugas yang diberikan, tetapi semangat saya akan tetap terus menyala.



Mochtar Luthfi Alanshari

Menjadi bagian di Washilah itu seru, asyik dan menyenangkan ada juga perasaan *dumba-dumbanya* sedikit. Tetapi apapun yang terjadi, ingat pepatah Jepang pernah berkata "*Jangan lupa bersyukur*."



Nurul Emil Dayani

Bergabung di Washilah seperti merakit puzzle besar, di mana setiap kontribusi, sekecil apapun, menjadi bagian tak terpisahkan dari gambaran yang indah dan penuh arti.



Mujahid

Menjadi yang terbaik dari hari sebelumnya adalah keinginan semua manusia. Begitu pula di Washilah, mengajarkan setiap anggotanya untuk tetap menjadi yang terbaik untuk hari kedepannya.



Faiz Dito Setiawan

Kritis dan bijaklah terhadap sesuatu, tetap berada di jalur kebenaran di tengah kebiadaban.



A Jihan Febriani Burhan

Selama ber-Washilah saya belajar banyak hal, dan ternyata menja-di pers merupakan sesuatu yang menarik. Sebab, dalam interaksi nya kita bertemu banyak orang dengan karakter berbeda-beda.



Nandya Fitri Ramadhani

Abadi seperti edelweis, tumbuh seperti padi yang semakin merunduk. Tidak perlu menjadi singa untuk mendapat gelar sebagai raja rimba, cukup menjadi serigala yang tidak pernah ada di wahana sirkus manusia.



Nur Rahmadani Lira

Memilih ber-Washilah adalah memilih untuk berani, berproses, bertanggung jawab, berikrar janji, bersusah payah, serta berupaya menyatukan satu gagasan. Jika siap akan hal itu silahkan masuk, jika tidak usahakanlah dan bertahanlah.

Negara dan Kampus, Sama Saja: Tai Kucing!



Oleh: Rahmat Rizki

Juni usai dengan hujan puisi Sapardi Djoko Damono. Sedangkan Juli, diatuhi hujan tai kucing dari rektorat.

Tak ada yang lebih busuk dari hujan tai kucing bulan Juli

Dirahasiakannya kepentingan busuk kepada mahasiswanya

Tak ada yang lebih kejam dari hujan tai kucing bulan Juli

Dihapuskannya kebebasan-kebebasan yang suci itu

Tak ada yang lebih menyebarkan dari hujan tai kucing bulan Juli

Dibiarkannya kebucukan yang tak terampunkan memenjarakan kemerdekaan

Tak perlu risau bertanya tentang kata-kata yang saya gunakan dalam tulisan ini. Akan saya jelaskan satu persatu, dengan kemampuan saya, yang bukan siapa-siapa, bukan sarjana, bukan pula rektor.

Kata “tai kucing” yang akan sering saya pakai adalah ungkapan atau ekspresi saya ketika marah, jengkel, pada sesuatu yang sama sekali tak jelas, membingungkan dan asal-asalan. Ya, sering juga kata itu dengan sengaja atau tidak, menyerang saya sendiri. Sering pula kata itu saya sebutkan sebelum tidur. Sebagai salam perpisahan kepada hal yang menyebarkan di hari itu.

Kenapa “tai kucing?” Sebab hanya itu yang lebih sering saya temui dan injak sekali waktu. Di pekarangan rumah, sekretariat organisasi, rumah orang, pinggir jalan dsb., Baunya menyengat. Tak lekang oleh waktu. Hampir abadi. Bukan karena saya tak senang dengan kucing, hanya saja kotornya memang layak diperhitungkan sebagai idiom yang nyentrik, sekaligus sebuah pernyataan perang kepada apapun, pembodohan, kemunafikan, penindasan dan ketamakan.

Pada bulan Juni, saya menghabiskan sedikit banyaknya waktu untuk membaca puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Apalagi dengan salah satu puisinya yang masyhur itu, Hujan Bulan Juni. Sangat romantis. Pas untuk yang sedang jatuh cinta. Tapi saya tidak sedang jatuh cinta saat itu. Saya hanya jatuh di lautan fakta, bahwa di Juni yang romantis, penguasa telah mempersiapkan sebuah aturan yang bengis.

Benar saja, kala saya terbangun dan menemui kotoran yang diturunkan rektorat pada 25 Juli, bernama lengkap: Surat Edaran (SE) Nomor 2591, tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi. Sejak saat itu, saya mengalami halusinasi. Saya melihat gedung rektorat berubah menjadi mirip kucing. Sebagaimana saya memahami hewan itu—seenaknya dan semauanya.

Apalagi saat ingin mengeluarkan kotoran. Tentu tak ada izin kepada tuannya, di mana dan kapan gumpalan busuk itu akan dimuntahkan. Sebab

si kucing barangkali menganggap ia tak bertuan, malah merasa dirinyalah tuan yang perlu dilayani—dengan itu pula tak ada izin untuk berak. Padahal tuannya dengan telaten memberinya makan, dari UKT yang dibayar setiap enam bulan sekali.

Kotoran tersebut keluar tanpa aba-aba, tanpa izin kepada tuannya. Sekadar pemberitahuan pun tak ada. Aromanya menyeruak, lebih busuk dibanding kotoran manapun, menabrak hidung dan aturan. Bahkan 31 tuannya diberi hukuman, hanya karena memprotes bahwa “tai” itu sudah dengan lancang menempelng tuannya.

Tai Kucing bernama SE 2591 itu berisi aturan agar para tuan (mahasiswa—demonstran) menyampaikan dan perlu mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memprotes kebijakan si “tuan palsu”—dia atau mereka yang membuat kebijakan dengan menjadikan dirinya sebagai tuan yang superior, atau sedang mematuhi perintah yang lebih berkuasa darinya untuk mengamankan kekuasaan.

Menjadi teramat menyedihkan saat SE 2591 itu “lagi” dengan tiba-tiba berubah sampul, “Surat Edaran Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 3652 Tahun 2024 Tentang Penyempurnaan Ketentuan Menyampaikan Aspirasi Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.” Dengan isi yang sama sekali tidak jauh berbeda, sekalipun berbunyi “penyempurnaan”.

Dalam penyempurnaan yang baru ini, terdapat kata-kata yang menurut saya, tidak memiliki substansi dan terkesan asal-asalan. Seperti pada poin A, nomor 3, yang menyebutkan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar “sering tidak terkontrol, mengganggu ketertiban umum, merusak aset negara, dan berpotensi menimbulkan kebencian, mengganggu aktivitas publik.”

Tanpa data. Tidak ada pula jumlah dan kasus seperti apa yang dimaksudkan. Siapa yang punya hak untuk mengontrol jalannya demonstrasi? Jelas, para demonstran sendiri. Dan tentu tidak mungkin untuk kekuasaan yang merupakan alasan mahasiswa berdemonstrasi untuk diberikan kontrol atas demonstrasi.

Apalagi dengan kata “merusak aset negara.” Kata ini meligitimasi bahwa negara memang satu hal terpisah dari rakyat, dan seolah memiliki tuannya sendiri, yang jika disentuh dan dirusak, sebuah otoritas akan murka. Memang membingungkan saat kita bermain-main dengan kata-kata yang disampaikan penguasa. Seolah akan kembali mempertanyakan, Negara itu apa? Serupa benda fisik atau non-fisik? Lalu bagaimana dengan pelanggaran konstitusi? Apakah itu tidak merusak aset negara? Apa itu negara, aset? Otak sachet?

Di luar pengertian harfiahnya, tentang aset negara, saya menganggap bahwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa atau siapapun itu adalah suatu bentuk luapan ekspresi atas kekecewaannya terhadap negara, yang lalai dengan hak-hak tuannya (rakyat). Dan nahasnya, kini kita menemukan banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada tuannya. Dari ujung Barat hingga Timur.

Tentang kekejaman itu, saya akan membiarkan Morgue Vanguard x Doyz dalam lagunya, Check Your People, untuk memekakkan telinga dan mata penguasa, yang semoga saja masih ada. “Garda negara terdapat datang menghajar, ratakan badan dan ladang di kala fajar. Aroma ban terbakar beserta para demonstran yang terkapar

berikan kabar, tentang kehancuran asa dari berbagai lini...

...Untuk mereka yang sagunya tergantikan sawit di Papua. Untuk mereka yang terhimpit tambang liar di Bone, Sinjai hingga Gowa. Masyarakat adat, petani Langkat. Mereka yang mempertahankan konservasi di Teluk Benoa, hingga mereka yang diujani serbuan bulldozer di Ibu kota. Bagi mereka yang bertahan di Rempang dan Pati. Di hadapan rezim Bandara di WTT dan Majalengka. Di bawah ancaman tambang di Kulon Progo, Lumajang Sumatera Utara, Karawang, Jambi hingga Bangka. Di bawah bedil di Urutsewu dan Bima. Di hadapan rezim konsesi dari Indramayu hingga Moro-moro. Yang bertahan di hadapan PLTU dari Batang hingga Lereng Ciremai dan di sudut-sudut kampung kota yang digempur penggusuran.”

Teramat banyak penindasan untuk menunggu izin (izin demonstrasi di UIN) diberikan. Teramat banyak darah yang tumpah sebelum izin diberikan. Teramat banyak perampasan, hak dan nyawa yang melayang sebelum izin perang diberikan. Kekuasaan sudah terlalu mapan untuk dibiarkan mengontrol izin! Diam dan menerima adalah Tai Kucing!

Apa itu Negara?

Dengan kondisi yang porak-poranda ini, negara tak ubahnya serupa mesin penghasil kekerasan, seperti yang disebutkan Max Weber, dalam Economy and Society (1979), bahwa institusi negara modern merupakan organisasi politik satu-satunya yang memiliki klaim atas monopoli dan kontrol terhadap sarana kekerasan.

Kekerasan sudah merupakan perkara yang melekat pada negara, sebagai sebuah kekerasan yang terorganisir (organized violence). Sebagai sesuatu yang melekat (embedded), maka siapapun yang memegang kendali negara (otoriter atau tidak), ia tetap akan menggunakan instrumen kekerasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaannya.

Salahkah saya menganggap negara adalah penyebab semua kerusakan ini? Teramat banyak yang rusak untuk dianggap baik-baik saja. Sungguh banyak dan tak terhitung jumlahnya. Masa ke masa. Dari pesisir hingga pegunungan. Semua dicaplok demi keuntungan. Hanya jumlah dan jenis kekerasan yang membedakan antara satu rezim dan rezim berikutnya. Yang membedakan hanya kadar kegilaannya saja. Sedang kekerasannya, akan tetap ada. Akumulasinya, berlipat ganda.

Akanlah saya dianggap menentang negara atau “kekiri-kirian” jika saya menuliskan keresahan saya tentang negara? Saya bukan Marxist, saya bukan pula penyembah komunis. Saya hanya pria manis (kata ibu saya). Saya bukan siapa-siapa. Tapi tak mengapa juga saat saya dianggap kiri, jika itu diartikan sebagai orang waras. Atau yang diartikan Ahmad Tohari, “orang kiri artinya bersimpati kepada penderitaan masyarakat miskin.” Iya, saya kiri. Apalagi kalau naik pete-pete, sebab kanan itu lewat jendela.

Dapatkah kita percaya pada negara? Saya pikir tidak. Tidak sama sekali. Jika fungsi negara adalah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk memperoleh hidup yang lebih baik, maka seharusnya hidup dalam negara tidak akan sepekil ini. Untuk mengujinya, jumlahkan saja berapa banyak orang-orang miskin yang kau kenal, yang kerjanya setengah mati namun hidupnya tetap dalam keadaan

hampir mati. Banyak? Tentu!

Berapa banyak lagi kematian yang terjadi untuk dianggap sebagai takdir? Tidak perlu untuk menghitungnya. Simpulkan saja: negara, memang kurang ajar!

Alexander Berkman pun mengungkapkan hal yang sama. “Negara tak akan lepas dari sifatnya yang destruktif (merusak) terhadap kebebasan individu.” Wahai kawanku, Alex, saya tak sekalipun ingin menjadi burung dalam sangkar. Saya tak ingin disetir oleh siapapun. Saya ingin bebas dan merdeka tanpa aturan yang tak pernah saya sepakati—pernyataan ini sering diartikan sebagai pembangkang yang liar dan tak teratur—wahai langit dan bumi, Tuhan dan Dewa, saya tidak akan menyiksa siapapun demi kebebasan saya. Maka bebaskanlah saya dari penyesalan negara yang sakit ini.

Seorang demonstran di Prancis pada Mei 1968, pernah bilang seperti ini, “Soyes Realistes, Demandez l’Impossible,” bahasa inggrisnya: “Be realistic, demand the impossible.” Jadi realistis, tuntutlah yang tidak mungkin! Kalau pernyataan ini kau anggap lucu, cobalah baca tulisan Evi Mariani dengan judul yang sama, di Project Multatuli. Kalau masih kau anggap lucu, berarti lidahmu sudah berstempel pantat penguasa.

Kampus, Kaki-Tangan Kekuasaan

Apa yang kini terjadi di UIN Alauddin, bersama aturan tai kucing itu merupakan satu penundukan untuk mengamankan kekuasaan negara. Adalah benar dan nyata bahwa kampus telah membantu negara untuk melangsungkan kekuasaannya yang maha represif.

Aturan tentang ketentuan penyampaian aspirasi yang dikeluarkan UIN Alauddin Makassar adalah penundukan yang dilakukan kampus kepada mahasiswa. Sebagaimana yang disebutkan Louis Althusser, bahwa rupanya, kampus adalah bagian dari “aparatus negara” yang turut berkontribusi mempertahankan ‘kekuasaan’ lewat ideologi posifistik yang nampaknya hanya akan menjadikan mahasiswa tunduk.

Dalam esainya, “Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara” Althusser memilah dua bentuk aparatus yang bekerja untuk kekuasaan. Pertama, “aparatus represif negara,” yakni pemerintah, pengadilan, penjara, angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Perannya adalah untuk mengamankan kekuasaan (negara kapitalis yang berisikan dinasti-dinasti politik, dinasti-dinasti militer dsb.) dengan represi atau kekuatan fisik, dari yang paling brutal, larangan dan perintah administratif.

Jenis kedua yaitu “aparatus ideologis negara,” yang bekerja secara lebih ‘halus’ seperti agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan dan seterusnya. Jika aparatus jenis pertama bekerja melalui kekerasan, aparatus jenis kedua akan bekerja melalui internalisasi secara ‘humanis’. Hal itu dapat berupa kurikulum, sistem administrasi, aturan sekolah atau kampus dan semacamnya.

Bagi Althusser, aparatus ideologi negara yang paling perkasa dalam mengamankan kekuasaan, pada hari-hari ini adalah pendidikan. Maka tak heran jika aturan yang dikeluarkan Rektor UIN Alauddin: SE 3652, mengharuskan “demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin... dapat berlangsung dengan damai, berkarakter,.....” adalah sebuah penundukan untuk mengamankan kekuasaan. Seolah aturan yang dikeluarkan telah

melalui analisis kritis yang mantap dan dengan pertimbangan yang aduhai. Sangat humanis manis-manis tai kucing.

Di sisi lain, Althusser juga punya satu pandangan yang berbeda, bahwa aparatus ideologi negara sebenarnya dapat menjadi modal dalam menciptakan suatu otoritas yang lebih bijak. Sederhananya, kampus adalah ruang yang dapat mewujudkan kebebasan dan menghancurkan kekuasaan. Dalam banyak catatan sejarah, kampus dan mahasiswa memang terbukti sebagai ancaman bagi kekuasaan.

Misalnya dalam buku “ALDERA, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999” merekam kaum muda-mahasiswa yang berangkat dari tiap-tiap kampus untuk melakukan perlawanan terhadap rezim otoritarianisme Orde Baru pada awal 1990-an. Mahasiswa dinilai sebagai kelompok yang paling berjasa memaksa Soeharto mundur dari kursi kekuasaannya, yang dipimpin selama 32 tahun.

Selain itu, Asri Abdullah dan Ostaf Al-Mustafa dalam “Kota Para Demonstran” bagian pertama—Gerakan Mahasiswa Dunia, Dari Manifesto Kordoba, Pendudukan Universitas, Okupasi Kota, Perang Gerilya Bersama Tentara Pemberontak sampai Rencana Pembunuhan Presiden—menceritakan bagaimana perlawanan terhadap kekuasaan yang dilakukan mahasiswa di berbagai benua di dunia.

Dari Manifesto Kordoba (gerakan ini menginginkan independensi otoritas universitas dari kontrol pemerintah) pada 1918, di Argentina. Tuntutan-tuntutan mahasiswa di Argentina kemudian menyebar ke seluruh Amerika Latin: Peru, Chili, Kolumbia, Paraguay, Brazil, Bolivia, Meksiko, Kuba, Venezuela dan Kosta Rika. Mereka menentang hal yang sama: kekuasaan.

Di luar Amerika Latin, kita dapat melihat mahasiswa Jepang dengan gerakan radikalnya yang dikenal sebagai Zengakuren (Zen Ninon Gakusei Jichikai Sorengou atau All-Japan Federation of Student-Self Government-Association/Asosiasi seluruh Federasi Mahasiswa Jepang untuk Dewan Mahasiswa). Saat itu, 300.000 mahasiswa dari 145 universitas bergabung untuk menolak perpanjangan kerja sama Jepang dengan Amerika Serikat.

Cina, Italia dan beberapa negara lainnya pun serupa. Untuk membebaskan kampus dari cengkraman kekuasaan dan menentang sebuah kekuasaan yang lebih besar. Demi kebebasan berpikir. Demi lingkungan yang demokratis. Dan demi kematian para tiran. Semuanya berhasil membuat rezim kekuasaan bergidik.

Sehingga, hipotesis yang dinyatakan Althusser, bahwa institusi pendidikan/kampus dapat menjadi kendaraan untuk merebut atau menjatuhkan kekuasaan, bukan isapan jempol belaka. Maka kini kita hanya perlu menguasai institusi pendidikan/kampus untuk membangun ruang kebebasan kita.

Alerta! Alerta! Alerta!

Pimpinan kampus telah menjadi kaki-tangan kekuasaan, mereka diperintah oleh kekuasaan menjadi “Polisi Pikiran” bahkan telah berubah menjadi “Ministry of truth” atau kementerian kebenaran, seperti yang disebutkan George Orwell dalam novelnya, “1948.” Mereka membatasi pikiran. Mereka yang menentukan apa yang salah dan benar. Aturan hidup ada di tangan mereka. Dengan itu pula

kekuasaan dapat langgeng dan terus menyengsarakan.

Adalah benar dan menjadi kenyataan yang tak dapat dielakkan, bahwa kini, kampus, lebih dan kurangnya mirip seperti penjara. Kekuasaan telah bersarang, mencengkram kebebasan. UIN Alauddin dengan aturan "izin dulu sebelum kritik," Unhas dengan rektornya yang gemar mempolisikan mahasiswanya yang kritis, UNM dengan birokrat suka mengintimidasi, UMI dengan rektornya yang suka korupsi, dan jenis-jenis berbeda di kampus-kampus lainnya di Negara ini.

Memang. Institusi pendidikan yang semestinya mencerahkan dan memerdekakan manusia, justru men-

jadi sarana penindasan, dominasi dan hegemoni. Secara internal, penindasan itu berlangsung terhadap murid oleh gurunya (baca: tenaga pengajar). Secara eksternal, penindasan itu berasal dari kekuasaan dan dunia industri, yang melakukan hegemoni terhadap kampus, dosen dan mahasiswa, serta watak kurikulum (MBKM).

Menurut Paolo Freire, konsep pendidikan yang berlaku selama ini merupakan "konsep pendidikan gaya bank" (banking concept of education). Yaitu suatu konsep pendidikan yang menjadikan peserta didik seperti halnya celengan atau tabungan yang selalu siap diisi. Peserta didik dijadikan objek investasi dan sumber deposito, serupa

komoditas ekonomi. Depositor dan investornya adalah para guru sebagai perpanjangan tangan dari sistem yang sudah mapan dan berkuasa.

Sekolah atau pada tingkatan yang diagungkan lebih tinggi—kampus, ternyata bukan sesuatu yang netral atau bebas-nilai atau dianggap tidak terikat dengan sistem kekuasaan. Kenyataannya memang cuma menjadi alat untuk mewariskan dan merawat nilai-nilai resmi yang sedang berlaku dan diresmi oleh mereka yang menjalankan kekuasaan. Dan pada akhirnya, hanya sebagai lembaga pencetak sertifikat, yang setelahnya, kertas selebar itu akan disetor ke perusahaan atau sejenisnya untuk menjadi kelas pekerja

dengan gaji serba kecil. Memberikan seluruh kerja kerasnya untuk si tuan penguasa menjadi kaya berlipat ganda.

Luapkan!

Dengan "Trias Koruptika" yang otoriter, dengan kampus yang maha mengatur, kita hanya dapat memilih; tunduk atau menanduk!

Antara penindas atau tertindas? Bukan keduanya. Lalu apa? Kau yang tertekan. Sebab kebebasan adalah barang mahal. Harganya adalah darah (kalau di UIN Alauddin, namanya skorsing) bahkan kematian (DO). Namun untuk diam adalah kemustahilan, bahkan merupakan kejahatan.

Kalau kata Max Stirner, "kita mesti membangunkan jiwa-jiwa yang mengantuk! Miliki keberanian merusak dan kau akan segera melihat bunga-bunga indah tumbuh dari puing-puing yang telah kau luluh-lantakkan."

Kepada mereka yang menindas, katakan "Tai Kucing!"

**Penulis Merupakan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar*

Fast Fashion: Antara Gaya dan Pencemaran Lingkungan

Oleh: St Mardiah Rezky Andini

Pernahkah kamu merasa tidak punya pakaian sama sekali? Padahal, lemari tiga susun di kamarmu penuh. Saya juga begitu. Ketika ingin ke kampus, memilih pakaian di lemari bisa sampai 30 menit. Karenanya, saya bahkan sering terlambat ke kampus. Padahal, di lemari itu sangat banyak pakaian yang masih layak pakai.

Kira-kira kenapa? Karena dengan banyaknya pakaian membuat kita bingung. Dan kebingungan itu membuat kita berpikir untuk membuangnya saja. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh fast fashion.

Apa sih itu fast fashion? Istilah ini mengarah pada industri yang memproduksi pakaian secara cepat dalam 15 hari, cepat pakai, dan murah sesuai dengan tren kekinian.

Bila kau pernah berjalan ke sebuah mall, lantas memasuki sebuah toko bertuliskan Zara, Uniqlo, H&M dan beberapa merek lainnya, hingga membeli sebuah atau beberapa pasang pakaian, maka kamu adalah pengguna fast fashion.

Sekilas terdengar tidak ada yang salah, justru kau mungkin berpikir itu hal yang baik. Sebab di era ini, kita butuh yang serba cepat, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Fast fashion juga menyediakan alternatif pakaian murah bagi mereka yang tidak

sanggup membeli pakaian high-end. Tapi, coba bayangkan, bila dalam satu bulan, kau membeli 5-8 utas pakaian, dan secara konsisten melakukan itu, hingga lemari penuh, dan pakaian tak tahu akan kau apakan. Maka pilihan terakhirmu adalah membuangnya.

Sisi Gelap Produsen Pakaian

Persoalan fast fashion banyak diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Salah satu influencer di TikTok, Dino Augusto mengatakan fast fashion menimbulkan tiga dampak. Pertama, pabrik tersebut memproduksi selama 24 jam setiap harinya. Jadi, pabrik-pabrik itu berjalan non stop. Otomatis, emisi karbon dan sampah yang dihasilkan, serta bahan kimianya terus keluar selama berjam-jam.

Lalu, para pekerjaannya juga kadang dibayar tidak sesuai dengan kinerjanya. Kasus ini sudah terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dino mencontohkan di Jawa Barat yang memiliki pabrik produksi gila-gilaan yang tidak jelas apakah pekerjaannya dibayar dengan baik atau tidak. Bahkan yang dipekerjakan sebagian merupakan anak kecil dan tidak dibayar.

Masalah lain muncul dari bahan produksinya. Kain organik tidak bisa diproduksi dengan cepat. Akhirnya

produsen menggunakan kain yang berbahan kimia yang terbuat dari plastik seperti polyester. Pewarnaannya pun secara kimia.

Sebagaimana yang kita ketahui, plastik itu tidak seperti buah, sayuran, dan makanan lainnya yang cepat terurai secara alami. Ini meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Mengutip Kompas.com, dari 100 miliar pakaian yang diproduksi setiap tahunnya, 92 juta ton berakhir di tempat pembuangan sampah. Dari angka tersebut hanya sekitar satu atau dua persennya saja yang terdaur ulang. Diperkirakan akan melonjak hingga 134 juta ton per tahun pada 2030.

Selain berdampak pada lingkungan, limbah tekstil yang terbuang ke laut juga berdampak pada kesehatan biota laut. Pasalnya, bahan-bahan tekstil yang dibuang di laut dan pakaian yang mengandung plastik menyebabkan pencemaran mikroplastik.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Untuk mengurangi pembelian fast fashion kita bisa memulai dengan hal-hal kecil. Dengan tidak ikut trend membeli pakaian yang hanya lucu, edisi terbaru, ataupun viral. Ada sebuah pepatah mengatakan membeli apabila butuh bukan mengikuti hawa

nafsu yang hanya sekejap datang dan menghilang lagi. Dengan begitu, kamu terlepas dari orang yang mendukung produk fast fashion.

Hal yang perlu dilakukan selanjutnya, dengan membeli brand lokal. Sebab brand lokal mengandung kain yang cepat terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain kainnya yang berkualitas juga dibuat langsung oleh masyarakat lokal yang handal dalam hal menjahit.

Bertolak dari aku ataupun kamu, mulai sekarang bisa lebih respect lagi terhadap lingkungan. Dengan melihat kasus seperti diatas harusnya bisa membuka mata kamu untuk berhenti mendukung produk yang mengandung polyester. Terlebih membeli pakaian yang harus kamu kurangi, dengan kata lain jangan fomo.

Selain untuk menjawab kamu untuk mengurangi bahaya fast fashion dengan beli pakaian lebih sedikit yang bisa dipakai lama dan tidak cepat rusak, bisa juga membeli pakaian thrifting di pasar-pasar legal seperti tempat thrifting yang buka sudah lama ataupun membuka jasa preloved. Jika thrifting, kamu juga harus memperhatikan kebersihannya, kesehatannya, dan cuci berkali-kali memakai dettol.

Kamu juga bisa saling bertukar pakaian sesama teman, selain itu

kamu bisa memilih brand lokal yang mendukung ramah lingkungan, dan memilih kapas organik. Dengan begitu bisa mengakhiri pembuangan barang fast fashion tersebut ke tanah ataupun tong sampah bahkan ke laut. Yang mencemari dan menjadi tumpukan baju seperti gunung bahkan terlihat pulau di satelit. Jadi, setiap pembelian, kata, dan donasi berarti dalam perjuangan memperlambat fast fashion.



**Penulis Merupakan Mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*



Washilah Store

Menyediakan :

Salempang

Bucket

Jasa Foto

Jasa Makeup

Merchandise

washilah.store 0821 8756 4870



Kehidupan di Asrama Rusunawa: Antara Kenyamanan dan Keamanan



Suasana lantai 1 asrama Rusunawa, tampak jemuran berderet di depan kamar, Senin (9/12/2024). | Foto: Washilah - Sahril (Magang).

Washilah – Nurlatifah pernah berpikir untuk keluar. Namun itu bukan solusi baginya. Kendaraan dan biaya jadi soalnya. Sebab di asrama Rusunawa, dirinya merasa dekat dengan kampus, meski banyak pula dukanya.

“Pernah berpikir untuk keluar. Tapi sejauh ini kurasa tidak *ji* deh, nyaman ma. Karena kalau di luar, dipikir lagi kendaraan *ta*, rumah juga dipikir mahal sekali,” tuturnya saat ditemui Washilah, Kamis (14/11/24).

Latifah, sapaan akrabnya, sudah sedari Mahasiswa Baru (Maba) tinggal di Asrama Rusunawa UIN Alauddin Makassar, yang berhadapan dengan UPT Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin.

Keputusan untuk tinggal di sana, berasal dari orang tuanya. Sebab asrama dianggap aman dan terjangkau untuk Latifa. Karena itu, ia tak punya pilihan lain. Sebaliknya, tinggal di Asrama kampus dapat mempermudahnya

yang tak memiliki kendaraan untuk berkuliah.

Setiap akan berkuliah, Latifah tak risau memikirkan kendaraan apa untuk ke kampus. Ia hanya perlu berjalan kaki kurang dari lima menit untuk sampai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), tempatnya berkuliah. Sebab asrama yang ia tempati berada di dalam kampus.

Soal biaya, Latifah hanya perlu merogoh kocek sebesar 3 juta untuk tinggal selama satu tahun. Biaya itu telah mencakup listrik, air dan fasilitas sarana prasarana asrama.

Di asrama, Latifah tinggal sekamar dengan kawannya. Walau begitu, Latifah tak keberatan. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Apalagi, kamar yang ia tempati dirasa cukup untuk dihuni oleh dua orang.

Dengan kemudahan yang dirasakan Latifah, tak membuat ia lupa berkesah tentang asramanya. Salah satunya ialah gerbang kampus yang teramat ketat untuk dilewati saat malam. Bukan hanya itu, gerbang asrama pun telah ditutup

pada pukul 22.00 WITA.

Saat sedang aktif dalam sebuah kepanitiaan organisasi, Latifah sering pulang pada tengah malam, sesuai mengikuti latihan pementasan. Biasanya, setelah latihan, ia akan diantar pulang menggunakan motor oleh temannya.

Ketika sampai di gerbang kampus, petugas keamanan kadang tidak membiarkan temannya mengantar Latifah sampai ke depan asrama. Akhirnya, ia sering berjalan kaki seorang diri dalam gelapnya kampus menuju asrama.

“Jalan dari gerbang depan sampai asrama karena satpam melarang mengantar masuk sampai asrama,” pungkasnya.

Jika sedang sial, Latifah mesti menemui dirinya terdampar di teras masjid. Sebab kadang pula pintu asramanya terkunci rapat. Tak ada yang membukanya. Ia juga sungkan meminta ketua asrama yang memegang kunci untuk membukanya.

“Sampai tidur di masjid karena tengah malam sekali *mi* juga jadi *nda* enak *ki*,” keluhnya.

Sebagai seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi, Latifah merasa aturan jam malam membatasinya dalam berkegiatan. Menurutnya, keluar malam tidak berarti ia keluyuran seenak jidatnya. Ia hanya sedang menjalani kegiatan organisasi yang merupakan haknya sebagai mahasiswa.

“Jam malam seharusnya ditambah. Karena dibatasi sekali mahasiswa (penghuni asrama kampus) untuk berkegiatan. Kalau malam *jammi* ada dikunci (asrama),” keluhnya sekali lagi.

Selain itu, selama tinggal di asrama Rusunawa, Latifah juga meresahkan adanya aturan bertamu antar kamar. Aturan tersebut membatasi Latifah

mengunjungi kamar penghuni lainnya. Karena itu, ia merasa asing dengan penghuni lainnya.

“Kurang sekali kebersamaan sampai tidak baku kenal *ki* sama satu tetangga kamar. Itu *ji* yang kukenal dulu, itu *tong ji* yang kukenal sekarang,” ungkapnya.

Meski banyak keluhan, Latifah yang kini duduk di semester 5, masih tetap tinggal di Asrama Rusunawa UIN Alauddin Makassar. Alasannya tak muluk-muluk, ia dapat berjalan kaki untuk berkuliah.

Demi Keamanan Bersama

Berbeda dengan Latifah, salah satu penghuni sekaligus ketua Asrama Rusunawa, Sumirah, tak masalah dengan aturan malam yang diterapkan. Katanya, demi keamanan bersama di asrama, juga karena dirinya tak suka keluar beraktivitas di malam hari.

Sebagai ketua asrama yang tak masalah dengan aturan malam, tak pula membuat Sumirah membatasi penghuni lainnya untuk keluar asrama pada malam hari. Kesibukan berorganisasi, kerja kelompok dan kepentingan lainnya tetap dapat dilakukan asal izin kepadanya.

Dalam penjelasannya, Sumirah akan tetap memberikan izin kepada penghuni yang mempunyai kesibukan di luar asrama pada malam hari. Namun, hanya sampai pukul 22.00 WITA.

“Kalau saya kan *nggak* suka memang keluar. Lebih betah memang di asrama. Kalau ada anak-anak yang keluar, yaudah. Tapi jam 10 malam itu harus pulang,” jelasnya pada Washilah, Kamis (14/11/24).

Sumirah tidak mempersulit bagi yang menyampaikan izin dengan alasan yang masuk akal. Ia juga akan siap

membukakan pintu asrama kepada penghuni yang telah pulang ke asrama.

“Yang penting bukan karena nongkrong-nongkrong biasa, bukan masalah perkuliahan,” ujarnya.

Kadang kala, Sumirah harus terbangun di tengah malam untuk membuka pintu asrama bagi penghuni yang baru saja pulang. Hal ini menjadi keluhannya sebagai ketua asrama.

Soalnya, tatkala ia seharian suntuk mengerjakan tugas kuliah dan pekerjaan lainnya, ia akan merebahkan leharnya di malam hari. Harapannya, ia akan melewati malam dengan tenang di kasur empuknya. Namun, saat seorang penghuni asrama menepkannya untuk membuka pintu, mau tidak mau, ia harus bangun dan menyentak kunci agar pintu dapat terbuka.

“Kadang ada yang tidak minta izin, dan kondisinya sedang nyenyak tidur tiba-tiba ditelpon. Yaudah dibukakan,” keluhannya.

Di sisi lain, sebagai ketua asrama yang telah tinggal sejak 2017 sebagai mahasiswa S1, dan kini sedang menjalani studi S2 pada Jurusan Dirasah Islamiah, Sumirah bertanggungjawab memastikan fasilitas dan menerapkan aturan asrama yang berlaku kepada penghuni lainnya.

Meski begitu, Sumirah juga merasa bahwa asrama yang ditempatinya masih perlu pembenahan. Seperti pada fasilitas yang kadangkala rusak pada beberapa kamar. Air yang mampet, plafon bocor dan semacamnya.

“Semoga fasilitas-fasilitasnya terus diperbaiki, terus ditingkatkan,” harapnya.

**Penulis: Ida Yani/Nurfadillah/
A Jihan Febriani Burhan (Magang)
Editor: Rahmat Rizki

Minim Keamanan, Cafeteria Kampus Rawan Kecurian

Washilah – “*Dia (pelaku pencurian) lewat jendela, kan kemarin (sebelum kecurian) belum ada pengaman yang dipasang di kusen jendela,*” ujar Ramlah menceritakan pengalamannya kehilangan isi kulkas dan tabung gas saat ditemui pada Hari Jum’at, 27 Desember 2024.

Ramlah (bukan nama sebenarnya), ia merupakan salah satu penyewa kantin yang terletak di antara Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK). Kantin yang belakangan dibobol oleh orang tak dikenal pada malam hari.

Tidak hanya sekali, Ramlah rupanya sudah dua kali menjadi korban pencurian hanya dalam sepekan. Kejadian pertama terjadi pada Rabu, 27 November 2024. Pada kejadian itu, seluruh isi kulkas yang baru saja terisi jadi kosong melompong diambil maling. Yang tersisa hanyalah sebuah minuman kemasan. “Hanya satu minuman dingin yang disisakan, itu *ji* teh kotak mungkin pelakunya berfikir nanti saya kehausan,” ucapnya sambil tertawa kecil mengingat kejadian di hari itu.

Kecolongan kedua Ramlah terjadi pada Minggu, 1 Desember 2024. Kali ini tabung gas yang ia simpan di lantai dua kantin lagi-lagi menghilang. Padahal, pada waktu itu belum genap seminggu barang dagangannya menghilang. Ramlah menduga-duga maling masuk melalui jendela lantai dua yang saat itu belum dipasang pengaman. Kejadian ini membuatnya kapok, ia lalu memasang pengaman pada kusen

menggunakan dana pribadi.

Ramlah bukan satu-satunya korban. Kejadian serupa juga dilaporkan oleh salah satu penyewa di Cafeteria Depan Perpustakaan Umum yang tak ingin disebutkan namanya. Sama seperti Ramlah, tabung gas penyewa tersebut turut raib, waktu kecuriannya juga persis pada malam hari seperti Ramlah.

Saat ditemui pada 27 November 2024, sang penyewa tersebut mengatakan jika kecurian yang ia alami juga terjadi pada tanggal 1 Desember 2024. Ia enggan berkomentar banyak dan hanya mengatakan bahwa yang dicuri berupa dua tabung gas.

Mereka lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Alauddin Makassar untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Jika tidak, mereka mengaku akan membawanya ke jalur hukum yang lebih serius.

“Semua pedagang menjadi heboh tidak hanya yang kehilangan. Semua saling bertanya tentang barang apa saja yang hilang, dan kami langsung melapor ke P2B,” ujar penyewa tersebut.

Menurut Ramlah, minimnya pengawasan dan belum adanya CCTV menjadi salah satu faktor utama maraknya pencurian di kantin. Hal ini juga membuat orang bertanya-tanya dan menaruh curiga pada orang sekitar tanpa landasan yang jelas. Meski sudah ada beberapa upaya pencegahan, beberapa pihak masih merasa bahwa langkah-langkah tersebut belum cukup. Minimnya pengamanan fisik, seperti pagar yang kokoh dan pengamanan jendela di lantai atas yang tak seberapa, dianggap menjadi celah bagi maling nantinya.

“Percuma pagar kantin dikunci jika di sela-sela temboknya orang masih bisa masuk ke dalamnya,” celetuk seorang penyewa lainnya sambil menunjuk pagar kantin yang terlihat rendah dan mudah untuk dipanjat.

Patroli keamanan yang dilakukan petugas dinilai kurang efektif. Ramlah mengaku jarang melihat Satpam berpatroli di malam hari. Ia mengatakan Satpam baru getol patroli di area kantin setelah isu pencurian beredar. Patroli tersebut diketahui dilakukan pada pukul lima sore.

“Aktif *pi* pencurian ini baru ada keamanan keliling mengencur mahasiswa untuk jam pulang,” ucap dia.

Beruntungnya, maling tersebut akhirnya dapat diidentifikasi dan ditemukan berkat rekaman CCTV milik salah satu penyewa kantin yang terletak di samping FSH, lebih tepatnya yang berada di lantai satu gedung kantin tersebut.

Ramlah membeberkan jika maling tersebut merupakan seorang mahasiswa. Ia sebut maling tersebut siap bertanggung jawab dan mengembalikan barang curian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Walau begitu, Ramlah mengaku hanya meminta tabung gasnya saja yang dikembalikan walau sudah tidak berisi.

Sebetulnya, para pedagang sudah beberapa kali mengusulkan pemasangan CCTV di setiap lantai kantin untuk meminimalkan tindak pencurian. Beberapa bahkan bersedia menanggung biaya pemasangan CCTV, asal perangkat tersebut dipasang atas nama kampus. Namun, hingga kini, CCTV baru terpasang di beberapa titik.

“Kemarin kami usulkan biar kami



Kantin Rusunawa UIN Alauddin Makassar, salah satu dari dua kafetaria yang pernah mengalami pencurian alat dan bahan jualan salah seorang penyewa kios, Senin (30/12/2024). | Foto: Washilah - Sahril (Magang).

yang bayar, asalkan pihak kampus yang fasilitas pemasangan CCTV-nya,” ungkap salah satu pedagang.

Dari pantauan Washilah, pada sejumlah titik di kantin yang tersebar di kampus peradaban memang sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti kursi dan beberapa kipas angin. Hanya saja, tak nampak satupun CCTV di kantin-kantin tersebut.

Manager Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2B, Abdullah dalam wawancaranya memberikan klarifikasi terkait maraknya pencurian di kantin. Ia menjelaskan bahwa pengawasan keamanan di luar jam operasional kampus bukan merupakan tanggung jawab dari P2B, melainkan tugas petugas keamanan yakni Satpam.

“Kami sudah berusaha maksimal menyediakan fasilitas. Tetapi, setelah jam operasional kampus, itu sudah

menjadi ranah *security*. Kami juga sudah meminta mereka untuk lebih aktif patroli minimal satu jam sekali,” jelas Abdullah.

Ia juga menyampaikan bahwa masalah ini susah untuk ditindaklanjuti, Satpam sudah diberi teguran keras agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Akan tetapi, untuk pemasangan CCTV pihak P2B telah merencanakan hal tersebut yang mungkin akan direalisasikan di tahun 2025. Pihak P2B saat ini fokus kepada peningkatan keamanan *security*, agar strategi keamanannya bisa diupgrade lebih baik lagi.

“Untuk sekarang, kami fokus pada penguatan patroli keamanan,” ucapnya.

**Penulis: Nandya Fitri Ramadhani/Nur Fathanah (Magang)
Editor: Saldi Adrian

PTN-BH Sarat Polemik

Washilah - Program Studi (Prodi) di bawah naungan UIN Alauddin Makassar terus meraih akreditasi unggul. UIN Alauddin sendiri telah memperoleh akreditasi unggul pada 16 April 2024, dengan nilai 367 berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Mengacu pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020 Pasal 2, salah satu syarat menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah memiliki setidaknya 60% Prodi berstatus unggul. Apabila hal tersebut terpenuhi, bukan tidak mungkin UIN akan bertransformasi menjadi PTN-BH—memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan dan sumber daya lainnya, termasuk dalam menentukan besaran biaya pendidikan. Hal tersebut, membuat PTN-BH sering kali dikritik karena dianggap merugikan masyarakat kampus. PTN-BH dianggap petaka bagi dunia akademik, layaknya memburu sumur pembiayaan pendidikan dan sarana-sarana di perguruan tinggi menjadi komersialisasi. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap perubahan tersebut? Berikut hasil wawancara para reporter Washilah kepada para mahasiswa.

Ahkamul Ihkam Mada (Apatis Makassar)

Apatis (Aliansi Pendidikan Gratis) memandang bahwa PTN-BH itu adalah cara pemerintah melepas tanggung jawabnya di sektor pendidikan, supaya beban anggaran APBN yang dikeluarkan untuk pendidikan bisa berkurang dan dialihkan ke bidang lain. Apatis konsisten sejak dulu menolak PTN-BH, karena kita membaca bahwa hal tersebut merupakan privatisasi pendidikan. Privatisasi pendidikan adalah perguruan tinggi negeri yang harusnya menjadi lembaga publik menjadi lembaga privat karena dia punya badan hukum sendiri. Konsekuensinya, negara tidak banyak campur tangan pada lembaga. Dalam Permendikbud No. 2 Tahun 2024, kampus berhak menambahkan golongan UKT dan memberikan jalur mandiri 50%. Artinya jalur mandiri 50%, subsidi 50%, negara sudah tidak menjamin bahwa pendidikan tinggi bisa diakses oleh banyak orang. Apatis terang-terangan menolak dan menuntut hal tersebut.



Muh. Resky (Sekretaris Jenderal Dema-U)

Ketika UIN beralih ke PTN-BH, semua hal akan dibawa ke ranah transaksional. Contoh salah satunya, ketika audit disewakan 14 juta per hari untuk pernikahan, kemudian ada mahasiswa berkegiatan dan bertabrakan dengan hari yang booking, yang lebih diutamakan pasti yang membayar dan itu bukan rahasia lagi. Jadi, bukan persoalan UKT saja, banyak hal yang akan berefek karena negara sudah melepas tanggung jawabnya untuk mendanai, maka semua hal bisa dihisap dalam lingkup kampus.



Izzatul Jannah (Ketua HMJ Pendidikan Bahasa Inggris)

Saya rasa UIN Alauddin Makassar belum mampu untuk menjadi PTN-BH. Masih banyak hal-hal lain yang perlu diperbaiki dulu sebelum di tahap PTN-BH itu sendiri, jadi saya rasa ada beberapa tahap yang perlu ditingkatkan lagi. Misalnya, UKT yang akan melambung tinggi karena kebijakan akan dibuat secara otonom.



Muh. Izhar Attar Syach (Wakil Ketua I HMJ Komunikasi dan Penyiaran Islam)

Isu ini memang jadi bahan diskusi karena banyak merugikan mahasiswa khususnya mahasiswa yang finansialnya tidak cukup atau menengah ke bawah. Untuk UIN sebenarnya belum mampu beralih ke PTN-BH karena berstatus negeri, yang seharusnya itu menjadi nilai bagi kita sehingga orang-orang yang tidak mampu, orang-orang dari pedalaman bisa merasakan hak pendidikan, karena salah satu hak manusia yang ada di Indonesia adalah pendidikan. Seandainya memang UIN punya jaminan ketika hendak beralih status ke PTN-BH, minimal beasiswanya juga merata dan tepat sasaran, sehingga orang-orang yang seharusnya mampu untuk membayar UKT tidak perlu lagi dapat beasiswa.



Muh. Alwi Nur (Ketua HMJ Perencanaan Wilayah dan Kota)

Kalau UIN jadi PTN-BH, itu hal yang bagus. Menurut saya, itu bisa jauh lebih baik untuk pengelolaan dalam internal UIN Alauddin itu sendiri karena seperti yang kita tahu bahwa otonomi penuh itu diberikan ke tingkat universitas. Kenapa itu bisa lebih baik? Karena UIN Alauddin Makassar bisa meningkatkan kompetensinya sendiri, kapasitasnya dari apa yang mereka kelola, karena beberapa hal yang kemudian menjadi alasan-alasan pimpinan saat ini adalah aturan kementerian yang begitu banyaknya, kemudian tidak masuk ke dalam kemauan dari mahasiswa UIN.



Mursil Aksham (Ketua HMJ Ilmu Hukum)

Jatuhnya, jalan terakhir yang digunakan adalah memoroti mahasiswa dengan pembayaran-pembayaran yang jumlahnya tinggi, misalnya uang pembangunan untuk masuk kampus.



Muh Aswar (Ketua HMJ Ilmu Ekonomi)

Saya melihat itu adalah bentuk politisasi karena negara punya dana yang kemudian disalurkan. Ketika perguruan tinggi menjadi PTN-BH, otomatis subsidi atau dana yang dikeluarkan tidak lagi diberikan pada kampus yang berstatus PTN-BH dan alokasi dananya perlu dipertanyakan. Kalau kita melihat kembali dasar negara kita yakni UUD tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya pendidikan di tanggung oleh negara. Dan menurut saya, persoalan PTN-BH, adanya biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa merupakan bentuk dari pembatasan suatu ilmu pengetahuan. Sejatinnya ilmu pengetahuan itu bersifat *public* yang bisa diakses oleh siapapun, tidak mengenal individu, golongan, dan sebagainya.



Yahya Nur (Ketua Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Ketika beralih status ke PTN-BH, UKT akan naik. Sedangkan berstatus BLU pun penetapan UKT tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa.



UKM Ritma Raih Gelar Top 5 Energy Founder

Washilah - Tiga anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Riset, Keilmuan, dan Kemitraan Masyarakat (Ritma) UIN Alauddin Makassar yang tergabung dalam satu tim berhasil meraih Top 5 Energy Founder PT Pertamina di Surabaya yang berlangsung pada 18-22 November 2024.

Mereka adalah Faisal Faiz dari jurusan Sistem Informasi, Trigunawan Musa dari jurusan Fisika, dan Desi Puspita Sari dari jurusan Arsitektur. Ketiganya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

Tim ini mengangkat penelitian berupa alat pemurni udara yang mampu menyerap polutan dan karbon dioksida. Melalui penyerapan tersebut mereka menerapkan sistem karbon kredit, di mana ketika industri mampu untuk mengurangi kuantitas karbon yang dikeluarkan di bawah batas kota yang telah diizinkan oleh pemerintah, maka industri dapat menjual kota

tersebut ke industri lain yang memiliki kuantitas keluaran karbon dioksida berlebih dari yang telah diizinkan.

Mereka berhasil meraih top 5 Energy Founder PT Pertamina yang diikuti lebih dari 800 tim seluruh Universitas di Indonesia. Tak hanya itu, tim tersebut juga mendapat jejaring dengan para investor dan pebisnis untuk merealisasikan ide mereka.

Salah satu peserta lomba UKM Ritma, Desi Puspita Sari merasa bangga mengikuti lomba tersebut, karena Desi beranggapan bahwa lomba tersebut bukannya hanya ajang mencari yang terbaik dari kontestan. Namun di lain sisi menjadi wadah untuk mengembangkan ide bisnis dan dapat merealisasikan ide mereka.

"Kami sangat senang bisa turut serta dalam lomba energi founder tahun ini, karena event ini bukan hanya sebagai ajang mencari yang terbaik," tuturnya.

Desi menambahkan lomba tersebut memiliki dampak positif, karena dirinya mengenal investor dan pebisnis

yang dapat membantu merealisasikan ide bisnisnya. Desi juga mengharapkan ide bisnis tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2025 mendatang.

"Ide bisnis dari lomba tersebut kita usahakan untuk direalisasikan. Tapi dengan beberapa pengembangan lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal Faiz menjelaskan persiapan tim mereka untuk mengikuti lomba meliputi beberapa tahap. Pertama, melakukan penelitian, diikuti dengan analisis pasar dan sinkronisasi. Lalu, membuat produk, merancang bisnis dan teknologi.

"Selanjutnya kami berlatih presentasi," tambahnya.

Faisal mengatakan, ide bisnis tersebut sebagai upaya menjadi solusi permasalahan yang selama ini telah banyak dirasakan oleh masyarakat dan global dan memiliki sifat yang berkelanjutan. Namun Faisal mengeluhkan kendala yang dialaminya, yakni tidak adanya pendanaan dari pihak Fakultas.

"Kalau kendala hanya di kampus, tidak ada pendanaan dari fakultas,"

keluarganya.

Salah satu anggota UKM Ritma Rika Afrilianty, mengatakan dirinya merasa senang terhadap pencapaian yang dilakukan oleh temannya, sebab temannya dapat bersaing dalam lomba tersebut.

Rika berpendapat, dari pencapaian tersebut membuat UKM Ritma menjadi wadah yang positif untuk digeluti. Sebab memiliki keaktifan dalam berkompetisi, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

"Saya merasa sangat bangga tentunya," jelasnya.

Rika menambahkan, ini adalah langkah yang positif untuk memperkuat citra UKM Ritma, membangun solidaritas eksternal dan membawa nama baik UKM Ritma ke tingkat yang lebih luas.

**Penulis: NurKadri (Magang)*

**Editor: Nadhilla Putri Hasir*



Foto: Dokumentasi pribadi Faizal Faiz, Trigunawan Musa, dan Desi Puspita Sari.

Tim Ria Kantongi Juara 1 LKTI Se-Indonesia Timur



Foto: Dokumentasi pribadi Muhammad Rafli, Andhini Wulandari dan Muhammad Nur Ikhsan Jufri.

Washilah - Mahasiswa UIN Alauddin Makassar raih juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PT-KIN) se-Indonesia Timur yang

dilaksanakan pada 11-18 November 2024.

Perwakilan dari UIN Alauddin, yakni Muhammad Rafli, Andhini Wulandari, dan Muhammad Nur Ikhsan Jufri. Ketiganya merupakan Maha-

siswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Angkatan 2021 Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK).

Tim yang tergabung dengan nama Ria (Rafli, Iccang, Andin) berhasil mengalahkan berbagai PTKIN se-Indonesia Timur, salah satunya Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan IAIN Manado.

Lomba ini dilaksanakan secara hybrid, luring maupun daring. Pada awalnya tim Ria mengikuti lomba secara luring di Mataram hingga lolos 10 besar. Namun, karena kurangnya sponsor dana oleh fakultas hingga akhirnya tim tersebut mengikuti lomba secara daring. Tetapi kondisi tersebut tidak mematahkan semangat mereka hingga berhasil meraih juara 1.

Tim Ria mengangkat tema "VCO (Virgin Coconut Oil) Sebagai Alternatif Produk Ekonomi Berbasis Alam: Kontribusi Bagi Masyarakat dan Lingkungan".

Salah satu anggota tim, Muhammad Nur Ikhsan Jufri, mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi selama lomba adalah jaringan yang tidak lancar karena lomba dilakukan secara online. Selain itu, salah satu anggota tim sempat pulang kampung saat final berlangsung.

"Sehingga komunikasi tim menjadi kurang lancar," tambahnya.

Sementara itu, solusi yang ia lakukan adalah lebih fokus pada judul KTI-nya, memperhatikan dengan baik jadwal lomba, serta terus berkomunikasi dengan tim.

Lebih lanjut, Andhini Wulandari memberikan tanggapan positif setelah mengikuti LKTI PTKIN se-Indonesia Timur. Ia mengungkapkan bahwa proses pengerjaan KTI mendorongnya untuk mencari ide-ide baru, yang menurutnya merupakan tantangan menarik.

"Kemudian dari segi dewan juri yang memberikan banyak motivasi juga pembelajaran dan teman-teman lomba juga keren-keren," ujarnya.

Terakhir, ia berharap tim Ria dapat terus mengukir prestasi di masa depan dan menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya, dengan menunjukkan bahwa siapapun bisa berhasil asalkan mau berusaha.

**Penulis: NurKadri (Magang)*

**Editor: Nadhilla Putri Hasir*

Tapak Suci Sabet Juara 1 Turnamen Nasional

Washilah - Salah satu anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tapak Suci UIN Alauddin Makassar, sabet juara satu dalam kelas tanding under dewasa turnamen nasional pencak silat.

Diketahui, kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 600 peserta, yang dilaksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, berlangsung pada 13 hingga 17 November 2024.

Lomba tersebut memiliki beberapa tingkatan, mulai SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Beberapa Perguruan dari cabang tiap daerah pun ikut berkompetisi. Salah satunya dari Universitas Mu-

hammadiyah (UNISMUH) yang ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut.

Anggota UKM Tapak Suci, Saldi mengatakan bahwa ia diutus langsung oleh pelatih untuk mengikuti lomba tersebut tanpa melalui proses seleksi.

"Kecuali ada atlet yang beratnya sama (kelas yang dipertandingkan) akan diseleksi terlebih dahulu. Tapi kembali lagi sama pelatih," ungkapnya.

Sebelum Saldi mengikuti kegiatan, ia telah mempersiapkan dirinya dengan berlatih setiap hari dari sore hingga malam hari.

Menanggapi kemenangan tersebut, salah satu anggota UKM Tapak Suci, Erna mengatakan dengan adanya kemenangan salah satu anggotanya harus

menjadi momentum bagi seluruh anggota untuk terus berusaha dan menunjukkan potensi terbaik mereka.

"Ini adalah bukti bahwa kemampuan dan usaha keras yang selama ini dilakukan tidak sia-sia," ucapnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kemenangan ini dapat menjadi pemicu untuk membangun semangat kompetisi yang sehat di UKM Tapak Suci.

"Semoga lebih banyak anggota yang termotivasi untuk berprestasi dan berpartisipasi dalam turnamen-turnamen berikutnya," harapnya.

**Penulis: NurKadri (Magang)*

**Editor: Nadhilla Putri Hasir*



Foto: Dokumentasi pribadi Saldi.

Sang Patriot Mahasiswa

Oleh: Fitra Nur Suci

Pilar-pilar megah kokoh berdiri menjulang. Bangunannya bernuansa Eropa didominasi oleh gaya Gothic dan Renaissance, jendela kaca patri berwarna-warni, serta ukiran-ukiran rumit yang menghiasi dinding dan pintu. Antara bangunan yang satu dengan yang lainnya berjarak empat puluh kali setapak kaki. Konon, tempat ini disebut-sebut sebagai Tamadun, tempatnya kemajuan—negerinya penuntut ilmu.

Zaki duduk di bawah pohon rindang, memandang bunga-bunga bugenvil yang bergoyang pelan ditiup angin. Matahari pagi menyelinap di antara daun-daun, lalu-lalang mahasiswa sibuk dengan berbagai aktivitasnya.

Setiap sudutnya terasa hangat, apalagi kala mata memandang perbincangan mahasiswa dengan rektor. Alis Zaki berkerut, lantaran tak ada jarak antara mahasiswa dan pimpinan kampus. Mereka berdiskusi santai, layaknya rekan sejawat.

Zaki menarik napas panjang, lalu menghem-buskannya pelan. Kehangatan di sekelilingnya terasa asing, tapi juga menenangkan. Mahasiswa tidak harus selalu tunduk—berpikir keras soal narasi apa yang patut dikeluarkan—takut-takut menyakiti ego yang berkuasa.

“Zaki, apa kau sedang melamun lagi?” suara lembut mengusiknya.

Zaki mendongak dan mendapati Ayesha berdiri di hadapannya, dengan senyum cerah yang selalu mampu mengusir rasa canggung. Gadis itu membawa tumpukan buku tebal, sebagian terlihat usang tapi tetap terawat.

“Tamadun memang istimewa,” katanya seraya meletakkan buku-buku di pangkuannya.

“Tapi semua ini tidak muncul begitu saja. Ada banyak kerja keras, banyak pengorbanan dari generasi sebelumnya.”

Ayesha menatap jauh ke arah menara utama kampus, yang berdiri megah dengan jam besar di puncaknya.

“Dulu, Tamadun hanyalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh orang-orang biasa. Tapi ada satu orang, seorang pemuda bernama Khalid, yang bermimpi besar. Khalid ingin menjadikan tempat ini tempatnya penimba ilmu dan kebebasan berpikir menjadi dasar segala sesuatu. Awalnya, orang-orang menertawakannya. Bagaimana mungkin sebuah desa terpencil menjadi pusat kemajuan?”

Zaki mendengarkan dengan saksama. Ia bisa membayangkan Khalid, seorang pemuda dengan pandangan jauh ke depan, berjuang melawan skeptisisme di sekelilingnya.

Ayesha menatapnya dengan penuh pengertian. “Mungkin, kau di sini untuk menemukan dirimu sendiri. Seperti Khalid dulu. Siapa tahu, kau punya mimpi yang sama besarnya.”

Zaki tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Tamadun, ia merasa ada sesuatu yang menggeliat dalam hatinya—sebuah harapan kecil, bahwa mungkin dari tempat ini, ia bisa memulai sesuatu yang besar.

Zaki membuka matanya perlahan. Sinar

matahari pagi menyusup dari celah-celah jendela kamarnya yang berdebu. Ia terdiam sejenak, membiarkan bayangan Tamadun menghilang dari pikirannya.

Kenyataan di depannya sungguh berbeda. Dinding kamar kosnya yang kusam dengan cat mengelupas, ranjang berderit yang ia tempati, serta suara gaduh dari jalanan di luar segera mengingatkannya bahwa ia kembali ke dunia nyata. Kampus yang ia tempati tidak seperti Tamadun yang ada dalam mimpinya—bangunannya serupa namun hangatnya tak sama.

Pria itu berkuliah di sebuah kampus yang konon katanya dikenal dengan kampus ramah kalangan bawah, namun nyatanya narasi itu bak penenang bagi mereka yang kerap didongengi. Pada kenyataannya uang kuliah justru menjulang ke langit.

Ia bukan tipe mahasiswa berkantong tebal. Pakaiannya bisa dihitung, itupun sudah usang dan warnanya mulai memudar. Rambutnya panjang, berwarna hitam pekat, dan sedikit bergelombang namun tidak kribu. Musabab rambutnya itu, stereotipe preman akan menjadi hal pertama di benak orang saat melihatnya.

Desas-desus perihal uang kuliah yang akan segera naik sampai ke telinga Zaki sebab status perguruan tinggi akan berpindah haluan. Rumor itu membuat dompetnya menjadi mual. Tetapi, Zaki percaya, rektor masih punya hati nurani. Zaki memang belum pernah nebeng di mobil rektornya—boro-boro nebeng, salaman saja tak pernah. Paling mentok, Zaki hanya memandang rektor dari jauh itupun di acara seminar ataupun wisuda kampusnya. Satu-satunya yang ia tahu informasi tentang rektornya adalah seorang lulusan luar negeri dengan untaian gelar yang mengikuti namanya. Semoga, ilmu tersebut paling tidak mendatangkan sedikit belas kasih.

Harapan Zaki pupus, benar saja uang kuliah tunggal naik. Lebih menyakitkan lagi bagi Zaki kala melihat kawan akan memutuskan pendidikannya sebab masalah finansial.

Para mahasiswa yang dulunya dikenal aktivis hanya diam membisu, tidak ada yang berani bersuara lantang di depan gedung rektorat. Mahasiswa yang lain hanya berani mengeluh—suaranya lebih dulu dibawa angin daripada sampai ke telinga penguasa.

Zaki menatap layar ponselnya yang menampilkan pengumuman resmi tentang kenaikan uang kuliah. Tanggal pembayaran semakin dekat, pikirannya terasa buntu.

Hari itu, Zaki memutuskan untuk pergi ke gedung rektorat. Ia tahu aksinya mungkin tak akan mengubah apapun, tapi setidaknya ia ingin mencoba berbicara. Saat ia mendekati gedung megah itu, sebuah pemandangan menarik perhatiannya. Sekelompok mahasiswa berkumpul di bawah pohon besar, wajah mereka serius tapi penuh tekad.

“Zaki, sini!” panggil seseorang dari kelompok itu. Ia menoleh dan mendapati Fadhil melambaikan tangan.



Ilustrasi: Washilah - Nurkadri (Magang)

“Fadhil? Apa yang kau lakukan di sini?” tanyanya dengan nada tak percaya.

Fadhil tersenyum tipis. “Kami sedang menyusun rencana. Tidak semua orang diam, Zaki. Masih ada yang peduli.”

Ia melihat sekeliling. Beberapa wajah yang dikenalnya ada di sana, tapi kebanyakan adalah mahasiswa dari jurusan lain yang jarang ia temui. Mereka membahas strategi, mencari cara untuk menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan kerusuhan. Zaki, meskipun ragu, memutuskan untuk bergabung.

Seminggu kemudian, mereka melaksanakan aksi itu. Namun, saat mahasiswa berorasi di depan gedung rektorat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukannya mendapatkan respon, mereka malah disambut dengan aparat keamanan yang sudah berjaga. Beberapa mahasiswa dipaksa bubar, sementara lainnya ditangkap. Zaki mencoba melindungi Fadhil saat keributan mulai terjadi, tapi ia sendiri akhirnya digelandang masuk ke mobil polisi.

Malam itu, di dalam sel tahanan sementara, Zaki termenung. Ia memikirkan segala hal yang telah ia lakukan, mulai dari mimpi idealis tentang perubahan hingga kenyataan pahit yang ia hadapi. Namun, pikirannya terpecah ketika Fadhil duduk di sampingnya.

“Ini belum selesai,” ucapnya dengan nada yakin. “Kita mungkin kalah hari ini, tapi perubahan tidak datang dalam sehari.”

Keesokan harinya, kabar penangkapan

mahasiswa menyebar luas. Media sosial dipenuhi oleh unggahan tentang aksi mereka yang berakhir ricuh. Beberapa dosen dan alumni angkat suara, mengecam cara kampus menangani protes. Bahkan, nama Zaki disebut sebagai salah satu tokoh yang berani berdiri di garis depan.

Beberapa hari kemudian, Zaki dan teman-temannya dibebaskan. Mereka disambut oleh kerumunan mahasiswa di gerbang kantor polisi. Kampus tetap bersikukuh dengan kebijakan kenaikan uang kuliah dan pengamanan di gedung rektorat diperketat. Namun, Zaki tidak lagi sendiri. Diskusi-diskusi kecil terus digelar.

Hari demi hari berlalu. Meskipun kenaikan uang kuliah tetap diberlakukan, gerakan yang dipimpin Zaki telah berhasil menggugah kesadaran banyak pihak. Mahasiswa yang sebelumnya diam kini mulai berani berbicara, mendiskusikan isu-isu yang selama ini diabaikan. Bahkan, beberapa kebijakan lain yang dianggap memberatkan mahasiswa mulai dipertimbangkan ulang oleh pihak kampus.

Fadhil benar, untuk merubah sesuatu tak ada cara dan waktu instan. Seperti layaknya negeri bernama Tamadun dengan Khalid sebagai sosok di dalamnya. Zaki ingin menjadi seperti Khalid.

**Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*



**Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

Mereka yang Layak

Oleh: Nandya Fitri Ramadhani

Ada datang, lalu hilang,
Menatap sejenak, menjadi kenangan di benak,
Namun tetap ingat, siapa yang ada saat badai menghantam,
Siapa yang bersama saat derita menghimpit malam.

Saat bahagia menyapa di pagi hari,
Banyak yang hadir, menjemput tawa bersama,

Tapi di kala hujan mengguyur hati,
Siapa yang setia menemani

Siapa yang bertahan,
Dalam jatuh bangun dan deru kehidupan,
Agar saat menceritakan masalah,
Sakitmu tidak dikomentari “tak seberapa.”

Dan saat senyum menghiasi wajah,

Kau tahu siapa yang layak diajak berbagi rasa,
Tidak hanya dalam tawa tapi juga duka,
Yang akhirnya membawa kita pada kesimpulan
Bahwa sahabat sejati tak hanya hadir di kala senang tiba.

Menilik Rusunawa Kampus Peradaban

Washilah - Rumah Susun Sewa (Rusunawa) UIN Alauddin Makassar, dibangun pada tahun 2009 dan dikelola Kementerian Agama (Kemenag) sampai Akhir tahun 2015. Dengan dasar penyusunan anggaran untuk tahun 2016, gedung yang terletak di sisi kanan kafetaria dan bagian depan Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin Makassar kemudian diserahkan dari Kemenag ke Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Alauddin Makassar pada awal tahun 2016 silam, Rabu (25/12/2024).

Pada awal tahun 2016, syarat untuk diterima masuk menjadi penghuni asrama hanya diperuntukkan kepada mahasiswa semester tujuh ke bawah dan membayar uang asrama senilai Rp1.250.000 per orang selama satu tahun. Namun, saat ini Rusunawa tidak membatasi penghuni asrama dengan golongan semester, termasuk mahasiswa pascasarjana. Uang pembayaran asrama pun telah naik 1,4 % menjadi Rp 3.000.000/orang selama satu tahun. Pembayaran asrama telah mencakup ongkos bayar listrik, air bersih, kebersihan dan keamanan asrama.

Gedung yang terdiri dari 96 kamar, perkamarnya dihuni empat orang yang difasilitasi lemari, meja belajar, tempat tidur susun dan kamar mandi dalam. Mahasiswa penghuni asrama juga harus mematuhi aturan dengan tidak membawa tamu masuk ke dalam gedung, menginap dan tidak diperbolehkan keluar di atas jam 10 malam.



Rusunawa, gedung yang dipersiapkan untuk hunian mahasiswa UIN Alauddin Makassar



Kondisi kursi tamu rusak. Beberapa penghuni Rusunawa mengeluhkan kondisi kursi tersebut.



Tamu penghuni asrama menunggu di depan gerbang. Hal tersebut sudah diatur dalam tata tertib asrama.



Terdapat dua parkir yang disediakan, yakni di luar dan di dalam gedung, tepatnya di lantai satu. Dari keterangan penghuni, sejauh ini belum ada kasus kehilangan motor di area tersebut.



Di sepanjang lorong Rusunawa dipenuhi jemuran para penghuni. Dari keterangan Staf Pengelola, Rishawati Harmini menyebutkan jika terdapat sebuah ruangan yang diperuntukkan khusus jemuran.

**Foto & Teks: Sahril/
Ulya Mutmainnah Ammar (Magang)
Editor: Mahfud Al-Qadri